



DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



RENCANA KERJA

2026

(0536) 3223756

Jl. Williem AS No. 08, Palangka Raya

www.dlh.kalteng.go.id



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

**RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PALANGKA RAYA

2025



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 36 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan pembangunan di daerah berjalan dengan baik, mencapai sasaran, serta berkesinambungan, sehingga diperlukan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan yang dituangkan kedalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi setelah RKPD ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6870);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2);

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2008 tentang Perubahan Atas Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1563);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
30. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 115);
31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 120);
32. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 31 Tahun 2025 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 (Lembaran Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

6. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun dalam periode 1 (satu) Tahun.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dinas daerah dan badan daerah dalam lingkup Pemerintah Provinsi.
8. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
10. Rencana Kerja dan Anggaran selanjutnya disingkat RKA.

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah disusun sebagai penjabaran lebih lanjut dengan mengacu dari RKPD Tahun 2026 dan Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029.
- (2) Kedudukan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan acuan dalam penyusunan RKA.
- (3) Sistematika Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun lalu;
 - c. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
 - d. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
 - e. Penutup.

Pasal 3

- (1) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 36 (tiga puluh enam) Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu:
 1. Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah;
 2. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah;
 3. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah;
 - a. RSUD Doris Sylvanus;
 - b. RSJ Kalawa Atei; dan
 - c. RSUD Hanau.
 4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah;
 5. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah;

6. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah;
8. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah;
9. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah;
10. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah;
11. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah;
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah;
13. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah;
14. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah;
15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah;
16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah;
17. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah;
18. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah;
19. Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah;
20. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah;
21. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah;
22. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;
23. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah;
24. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah;
25. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah;
26. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah;
27. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
28. Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
29. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
30. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
31. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah;
32. Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Tengah;
33. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah;
34. Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah;
35. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah; dan

36. Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah:
- a. Biro Administrasi Pimpinan;
 - b. Biro Kesejahteraan Rakyat;
 - c. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
 - d. Biro Hukum;
 - e. Biro Perekonomian;
 - f. Biro Pengadaan Barang dan Jasa;
 - g. Biro Administrasi Pembangunan;
 - h. Biro Organisasi; dan
 - i. Biro Umum.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 20 Juli 2025
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIAR SABRAN

Diundangkan di Palangka Raya
Pada Tanggal 20 Juli 2025

**Pit. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

ttd

LEONARD S. AMPUNG

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 36

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



MASKUR, S.H., M.H.
NIP. 19691025 199603 1 003

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan anugrah-Nya lah penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 ini dapat terselesaikan. Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2026 merupakan salah satu bagian dari substansi perencanaan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta sinkronisasi dari Perencanaan Strategis Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 dilakukan sebagaimana amanat dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pemerintah daerah dengan tetap mengedepankan dan mendorong partisipasi masyarakat sesuai dengan bidang kewenangan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2026 disusun berpedoman kepada Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029 dengan menyelaraskan kondisi eksisting serta isu-isu strategis yang ada pada saat ini.

Rencana Kerja ini merupakan acuan dalam pelaksanaan kegiatan, program dan arah kebijakan selama jangka waktu 1 (satu) tahun, juga akan menjadi acuan untuk evaluasi kinerja melalui pengukuran kinerja Instansi/Organisasi, berdasar pada data realisasi dan tingkat pencapaian target yang dapat dipertanggungjawabkan baik di lapangan (fisik) maupun secara administrasi.

Sebagai akhir kata, dengan memohon petunjuk dan anugerah Allah SWT, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah senantiasa berusaha melaksanakan tugas sesuai dengan rencana yang telah tersusun, sehingga dapat berkontribusi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Palangka Raya, Juli 2025

KEPALA DINAS



JONI HARTA, S.E., S.Hut., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 197606022005011010

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU	6
2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD	20
2.3 Isu-isu Penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.....	23
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	26
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	40
BAB III TUJUAN DAN SASARAN	51
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	51
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SOPD.....	52
3.3 Program dan Kegiatan	53
3.4 Pohon Kinerja, Cascading dan Crosscutting	57
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH...	58
BAB V PENUTUP	70
Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Lingkungan Hidup, serta sebagai salah satu pendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah.

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan prakiraan maju yang menggambarkan kebutuhan dana guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.

Proses penyusunan Renja dilakukan melalui tahapan : (1) Persiapan penyusunan Renja; (2) Penyusunan Rancangan Renja; (3) Pelaksanaan forum SKPD; dan (4) Penetapan Renja. Renja Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud merupakan hasil pembahasan usulan program dan kegiatan yang telah disinergikan dan tetap mengacu pada program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya Renja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2026 untuk mendukung perwujudan visi dan misi daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah, serta menjadi dasar estimasi terhadap penganggaran, yang akan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2026.

Perencanaan pembangunan daerah pada prinsipnya merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan bersama pemangku kepentingan sesuai peran dan kewenangan dengan memperhatikan kondisi, potensi serta dinamika daerah, nasional dan global. Oleh karena itu dokumen perencanaan pembangunan daerah saling terkait satu sama lainnya mulai dari tingkat pusat, provinsi hingga daerah.

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2026 sebagai dokumen perencanaan tahunan merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029.

Dinas Lingkungan Hidup, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah bidang lingkungan hidup. Oleh karena itu, selain berpedoman kepada dokumen perencanaan daerah Provinsi Kalimantan Tengah, tentunya juga tetap mensinergikan dengan dokumen perencanaan pada instansi vertikal seperti Renstra dan Renja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dinas Lingkungan Hidup secara khusus mendukung pencapaian misi daerah dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam. Dinas Lingkungan Hidup mempunyai peran besar dalam mencapai misi tersebut, dimana seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang ditunjukkan melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 -2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 115);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 90);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 102).
24. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 Nomor 37).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun pada Dinas Lingkungan Hidup. Penyusunan Renja ini juga dimaksudkan untuk memperbaiki tolok ukur dan alat bantu bagi unit-unit kerja yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup sehingga dapat secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan posisi dan peran yang diemban dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja adalah:

- a. Meningkatkan pelaksanaan fungsi perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup, penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum bidang lingkungan hidup; dan pelaksanaan, pengawasan,

pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang lingkungan hidup; serta penguatan lembaga Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah.

- b. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen perencanaan Daerah dan turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah.
- c. Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang lingkungan hidup selama 1 (satu) tahun ke depan agar terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran dan program pembangunan yang telah ditetapkan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Berisi Latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

Berisi tentang evaluasi pelaksanaan RENJA PD tahun lalu dan capaian Renstra perangkat daerah, Analisis kinerja pelayanan PD, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD, Review terhadap rancangan akhir RKPD, serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

Berisi tentang telaahan terhadap kebijakan nasional serta tujuan dan sasaran RENJA PD.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan akhir RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya, serta tabel rencana program dan kegiatan.

BAB V PENUTUP

Berisi uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Program-program yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup mengacu pada tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Program yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 sebanyak 11 Program, 20 Kegiatan dan 73 sub kegiatan meliputi:

2.1. Tabel program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah

2.11.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2.11.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.11.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2.11.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
2.11.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
2.11.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
2.11.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
2.11.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2.11.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.11.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.11.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
2.11.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
2.11.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
2.11.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
2.11.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2.11.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
2.11.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
2.11.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.11.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.11.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.11.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggunaan
2.11.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
2.11.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu
2.11.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2.11.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
2.11.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

2.11.01.1.07.05	Pengadaan Mebel
2.11.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2.11.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.11.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.11.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.11.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.11.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2.11.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup
2.11.02.1.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi
2.11.02.1.01.02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi
2.11.02.1.01.05	Penetapan RPPLH Provinsi
2.11.02.1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi
2.11.02.1.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
2.11.02.1.02.05	Pembinaan Penyelenggaraan KLHS
2.11.02.1.02.06	Pemantauan dan Evaluasi KLHS
2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
2.11.03.1.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
2.11.03.1.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
2.11.03.1.01.04	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan
2.11.03.1.01.05	Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat provinsi
2.11.03.1.01.09	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, udara dan Laut
2.11.03.1.01.11	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK
2.11.03.1.01.12	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah
2.11.03.1.01.13	Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di Provinsi
2.11.03.1.01.14	Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di Provinsi
2.11.03.1.01.15	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi
2.11.03.1.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
2.11.03.1.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
2.11.04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
2.11.04.1.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi
2.11.04.1.01.01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
2.11.04.1.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
2.11.04.1.01.06	Pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam pengelolaan keanekaragaman hayati
2.11.04.1.01.09	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati lainnya
2.11.05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
2.11.05.1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

2.11.05.1.01.01	Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2.11.05.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan
2.11.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
2.11.06.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Provinsi
2.11.06.1.01.01	Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
2.11.06.1.01.05	Pengembangan kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
2.11.06.1.01.06	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2.11.06.1.01.07	Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
2.11.07	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH
2.11.07.1.01	Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH
2.11.07.1.01.01	Koordinasi, sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH
2.11.08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
2.11.08.1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi
2.11.08.1.01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
2.11.08.1.01.03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi
2.11.08.1.01.05	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/ kelompok masyarakat
2.11.09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
2.11.09.1.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi
2.11.09.1.01.01	Penilaian kinerja masyarakat/ lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/ filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
2.11.10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
2.11.10.1.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi
2.11.10.1.01.03	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi
2.11.10.1.01.04	Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas Penyidik PNS LHK Daerah
2.11.10.1.01.05	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi
2.11.10.1.01.06	Penyelesaian kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan Provinsi
2.11.10.1.01.07	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi
2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan
2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional

2.11.11.1.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
2.11.11.1.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
2.11.11.1.01.09	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi
2.11.11.1.01.12	Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional
2.11.11.1.01.13	Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus yang menjadi kewenangan provinsi
2.11.11.1.01.14	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun 2024 pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Alokasi dan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2024
 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah

No.	Anggaran	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi	
				Rp	%
1	Belanja Operasi	60.830.859.587,00	61.013.888.510,27	32.735.935.346,00	53,65
2	Belanja Modal	17.858.124.784,00	18.578.840.722,73	15.216.784.820,00	81,90
	T o t a l	78.688.984.371,00	79.592.729.233,00	47.952.720.166,00	60,25

Secara umum seluruh rencana program dan kegiatan tahun 2024 pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah telah dapat direalisasikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Namun realisasi keuangan rendah dikarenakan terdapat kegiatan pembangunan taman Keanekaragaman Hayati (Kehati) dan pengadaan sarana/prasarana untuk taman Kehati yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR) tidak dapat terealisasi senilai Rp 23.000.000.000,00. Hal ini berpengaruh besar dengan nilai realisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena luasan lokasi awal untuk rencana pembangunan taman Kehati seluas < 10 Hektar, tidak memenuhi persyaratan teknis pembangunan.

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra PD s/d Triwulan IV Tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada tabel 2.1.

TABEL 2.1. REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S.D TAHUN 2025 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Perangkat Daerah : DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2021 s/d 2026)	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD di Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sd Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP									
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase keterlaksanaan (%)								
2.11.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD								
2.11.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	2 Dokumen	8 Dokumen	89%
2.11.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	5 Dokumen	83%
2.11.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	6 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	5 Dokumen	83%
2.11.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	5 Dokumen	83%
2.11.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	6 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	5 Dokumen	83%
2.11.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18 Laporan	9 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan	15 Laporan	83%
2.11.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	5 Laporan	83%
2.11.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	50 Data	0 Data	0 Data	0 Data	0%	0 Data	0 Data	0%

DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Jln. Willem A. Samat No. 08 Palangka Raya 73112-Kalimantan Tengah
Telp/Fax (0536) 3223756

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2021 s/d 2026)	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD di Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sd Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.11.01.1.01.0012	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	15 Berita Acara	0 Berita Acara	0 Berita Acara	0 Berita Acara	0%	0 Berita Acara	0 Berita Acara	0%
2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi keuangan PD								
2.11.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	347 Orang/Bulan	162 Orang/Bulan	57 Orang/Bulan	57 Orang/Bulan	100%	64 Orang/Bulan	283 Orang/Bulan	82%
2.11.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	0%	1 Laporan	1 Laporan	25%
2.11.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	8 Laporan	0 Laporan	2 Laporan	0 Laporan	0%	2 Laporan	2 Laporan	25%
2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah								
2.11.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	6 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	5 Dokumen	83%
2.11.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	5 Laporan	83%
2.11.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian PD (%)								
2.11.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	12 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	5 Paket	7 Paket	58%
2.11.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	75%
2.11.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	288 Orang	18 Orang	10 Orang	10 Orang	100%	250 Orang	278 Orang	97%
2.11.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	0 Orang	0%
2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum PD								

DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Jln. Willem A. Samat No. 08 Palangka Raya 73112-Kalimantan Tengah
Telp/Fax (0536) 3223756

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2021 s/d 2026)	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD di Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sd Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.11.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	3 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	5 Paket	83%
2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	26 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	100%	10 Paket	16 Paket	62%
2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	3 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	5 Paket	83%
2.11.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	5 Dokumen	83%
2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	5 Laporan	83%
2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	5 Laporan	9%
2.11.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0%	1 Dokumen	1 Dokumen	33%
2.11.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase keterlaksanaan pengadaan barang milik daerah								
2.11.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	12 Paket	3 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	5 Paket	9 Paket	75%
2.11.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	10 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	7 Unit	9 Unit	90%
2.11.01.1.07.0010	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	4 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	3 Unit	75%
2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan PD								
2.11.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	5 Laporan	83%
2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	5 Laporan	83%
2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	5 Laporan	83%

DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Jln. Willem A. Samat No. 08 Palangka Raya 73112-Kalimantan Tengah
Telp/Fax (0536) 3223756

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2021 s/d 2026)	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD di Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sd Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peresentase pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan PD								
2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	120 Unit	60 Unit	20 Unit	20 Unit	100%	20 Unit	100 Unit	83%
2.11.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0%	1 Unit	1 Unit	50%
2.11.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	6 Unit	3 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	5 Unit	83%
2.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen rencana dan perlindungan di Bidang Lingkungan Hidup dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan								
2.11.02.1.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Jumlah dokumen RPPLH								
2.11.02.1.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi	6 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	5 Dokumen	83%
2.11.02.1.02.0005	Penetapan RPPLH Provinsi	Dokumen RPPLH Provinsi yang ditetapkan	3 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	67%
2.11.02.1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Jumlah dokumen KLHS								
2.11.02.1.02.0009	Pembinaan, Penilaian, Evaluasi Terhadap KLHS Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kesesuaian Kaidah dalam Penyusunan KLHS Kabupaten/Kota	12 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	9 Dokumen	75%
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN /ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	IKLH								
2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Kegiatan pencegahan pencemaran dan /atau kerusakan lingkungan hidup								
2.11.03.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari lingkungan hidup yang Dilaksanakan	6 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	5 Dokumen	83%

DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Jln. Willem A. Samat No. 08 Palangka Raya 73112-Kalimantan Tengah
Telp/Fax (0536) 3223756

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2021 s/d 2026)	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD di Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sd Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.11.03.1.01.0004	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	Jumlah Pengambilan Contoh Uji dan Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan yang Dilaksanakan	36 Paket	0 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	2 Paket	6%
2.11.03.1.01.0005	Pelaksanaan Upaya Mitigasi Perubahan Iklim Tingkat Provinsi	Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim	3 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	2 Laporan	67%
2.11.03.1.01.0008	Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut yang disusun	3 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0%	2 Laporan	2 Laporan	67%
2.11.03.1.01.0009	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Data dan Informasin Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	41 Lokasi	0 Lokasi	12 Lokasi	12 Lokasi	100%	12 Lokasi	24 Lokasi	59%
2.11.03.1.01.0010	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah Air, Udara dan Laut	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut yang dilaksanakan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0%	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0%
2.11.03.1.01.0011	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emis GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	3 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	67%
2.11.03.1.01.0012	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	3 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	67%
2.11.03.1.01.0013	Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di Provinsi	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di Provinsi dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan	33 Unit	0 Unit	3 Unit	3 Unit	100%	15 Unit	18 Unit	55%
2.11.03.1.01.0014	Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di Provinsi	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di Provinsi yang dilakukan pemeliharaan	3 Unit	0 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	2 Unit	67%
2.11.03.1.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	123 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	60 Dokumen	64 Dokumen	52%
2.11.03.1.01.0016	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan	1 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0%	0 Laporan	0 Laporan	0%
2.11.03.1.01.0018	Penyusunan Kebijakan terkait dengan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya	Jumlah dokumen kebijakan terkait Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	0 Dokumen	0 Dokumen	0%

DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Jln. Willem A. Samat No. 08 Palangka Raya 73112-Kalimantan Tengah
Telp/Fax (0536) 3223756

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2021 s/d 2026)	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD di Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sd Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.11.03.1.02	Penanggulangan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah kegiatan upaya penanggulangan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup								
2.11.03.1.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat lintas Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	6 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	5 Laporan	83%
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Jumlah dokumen profil Kehati								
2.11.4.1.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Jumlah kegiatan pengelolaan keanekaragaman hayati provinsi								
2.11.04.1.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	75%
2.11.04.1.01.0006	Pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam pengelolaan keanekaragaman hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	550 Orang	250 Orang	200 Orang	200 Orang	100%	50 Orang	500 Orang	91%
02.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri)								
2.11.05.1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah usaha jasa pengumpulan limbah B3 lintas daerah kabupaten / kota dalam 1 (satu) daerah provinsi								
2.11.05.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	6 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	5 Dokumen	83%
2.11.05.1.01.0003	Fasilitasi Pemenuhan Persetujuan Teknis Pengumpulan Limbah B3 skala provinsi yang terintegrasi dengan Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, dan Perizinan Berusaha	Jumlah fasilitasi pemenuhan persetujuan teknis Pengumpulan Limbah B3 skala Provinsi yang terintegrasi dengan persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, dan Perizinan Berusaha	3 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	67%

DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Jln. Willem A. Samat No. 08 Palangka Raya 73112-Kalimantan Tengah
Telp/Fax (0536) 3223756

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2021 s/d 2026)	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD di Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sd Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.11.05.1.01.0004	Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pengumpulan limbah B3 skala provinsi	Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pengumpulan limbah B3 skala Provinsi yang dilakukan	1 Usaha	0 Usaha	0 Usaha	0 Usaha	0%	0 Usaha	0 Usaha	0%
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH								
2.11.06.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah usaha dan atau kegiatan yang dibina dan diawasi								
2.11.06.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang Diberikan	11 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	2 Dokumen	8 Dokumen	73%
2.11.06.1.01.0005	Pengembangan kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	15 Orang	0 Orang	5 Orang	5 Orang	100%	5 Orang	10 Orang	67%
2.11.06.1.01.0007	Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	11 Orang	0 Orang	1 Orang	1 Orang	100%	9 Orang	10 Orang	91%
2.11.06.1.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundangundangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	1087 Usaha/ kegiatan	285 Usaha/ kegiatan	138 Usaha/ kegiatan	71 Usaha/ kegiatan	51%	162 Usaha/ kegiatan	518 Usaha/ kegiatan	48%
2.11.06.1.01.0010	Layanan Sarana Prasarana Penegakan Hukum bidang Lingkungan Hidup	Jumlah Sarana Prasarana yang disediakan untuk Pengawas Lingkungan Hidup, Pengendali Dampak Lingkungan dan PPNS untuk menunjang Kinerja Penegakan Hukum	1 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0%	0 Unit	0 Unit	0%
2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA TERKAIT DENGAN PPLH	Jumlah keberadaan MHA, Kearifan lokal dan hak MHA terkait dengan PPLH								
2.11.07.1.01	Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah MHA yang terbentuk, diakui dan menjalankan kearifan lokal serta pengetahuan tradisional yang terkait dengan PPLH								

DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Jln. Willem A. Samat No. 08 Palangka Raya 73112-Kalimantan Tengah
Telp/Fax (0536) 3223756

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2021 s/d 2026)	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD di Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sd Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.11.07.1.01.0001	Koordinasi, sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	6 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	5 Dokumen	83%
2.11.07.1.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah MHA yang terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH								
2.11.07.1.02.0001	Pemberdayaan, Mitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan pemberdayaan, mitraan, pendampingan dan penguatan	3 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	67%
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah kegiatan pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup yang dilakukan								
2.11.08.1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah provinsi								
2.11.08.1.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat	450 Orang	180 Orang	60 Orang	60 Orang	100%	60 Orang	300 Orang	67%
2.11.08.1.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/ lembaga masyarakat/komunitas/ kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/ lembaga masyarakat/ komunitas/ kelompok masyarakat yang meningkatkan kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	7 Lembaga	3 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	100%	2 Lembaga	6 Lembaga	86%
2.11.08.1.01.0007	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah pembinaan dan pendampingan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	6 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	5 Dokumen	83%
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah penghargaan lingkungan yang didapat								
2.11.09.1.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Masyarakat	Jumlah penghargaan lingkungan hidup yang didapat oleh masyarakat/ lembaga masyarakat/ dunia usaha								

DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Jln. Willem A. Samat No. 08 Palangka Raya 73112-Kalimantan Tengah
Telp/Fax (0536) 3223756

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2021 s/d 2026)	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD di Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sd Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.11.09.1.01.0001	Penilaian kinerja masyarakat/ lembaga masyarakat/ dunia usaha/ dunia pendidikan/ filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah masyarakat/ lembaga masyarakat/ dunia usaha/ dunia pendidikan/ filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH	19 Entitas	9 Entitas	3 Entitas	3 Entitas	100%	5 Entitas	17 Entitas	89%
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup								
2.11.10.1.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Jumlah pengaduan yang ditangani								
2.11.10.1.01.0005	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	3 Perkara	0 Perkara	1 Perkara	1 Perkara	100%	1 Perkara	2 Perkara	67%
2.11.10.1.01.0006	Penyelesaian kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan Provinsi	Jumlah kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan Provinsi	3 Perkara	0 Perkara	1 Perkara	1 Perkara	100%	1 Perkara	2 Perkara	67%
2.11.10.1.01.0009	Pengelolaan Pengaduan permasalahan pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang dikelola ditindaklanjuti/ ditangani	20 Pengaduan	3 Pengaduan	1 Pengaduan	1 Pengaduan	100%	8 Pengaduan	12 Pengaduan	60%
2.11.10.1.01.0010	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Provinsi	3 Sanksi	0 Sanksi	1 Sanksi	1 Sanksi	100%	1 Sanksi	2 Sanksi	67%
2.11.10.1.01.0011	Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas PPNS Daerah Bidang Lingkungan Hidup	Jumlah PPNS Daerah bidang Lingkungan Hidup yang dibentuk dan ditingkatkan kapasitasnya	36 Orang	0 Orang	12 Orang	12 Orang	100%	12 Orang	24 Orang	67%
2.11.10.1.01.0012	Pengembangan Kapasitas SDM bidang Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	Jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitasnya dalam bidang Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	30 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	0 Orang	0%
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang								
2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/ TPST Regional	Jumlah Kegiatan Penangan Sampah Regional								
2.11.11.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan	3 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	67%

DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Jln. Willem A. Samat No. 08 Palangka Raya 73112-Kalimantan Tengah
Telp/Fax (0536) 3223756

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2021 s/d 2026)	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD di Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sd Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.11.11.1.01.0011	Pengelolaan sampah Regional	Jumlah sampah regional yang dikelola	5094 Ton	2434 Ton	849,05 Ton	1315,2 Ton	155%	866,03 Ton	4615 Ton	91%
2.11.11.1.01.0012	Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional	3 Unit	0 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	2 Unit	67%
2.11.11.1.01.0014	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	3 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	67%
2.11.11.1.01.0015	Pelaksanaan Penanganan Sampah Spesifik atau pada kondisi khusus yang menjadi kewenangan provinsi	Jumlah tonase sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang menjadi kewenangan provinsi yang ditangani	50 Ton	0 Ton	0 Ton	0 Ton	0%	0 Ton	0 Ton	0%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja perangkat Daerah, Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penaatan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud tersebut, Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi yaitu :

- a. Pelaksanaan tugas kesekretariatan.
- b. Perumusan kebijakan di Bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penaatan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
- c. Perencanaan program di Bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penaatan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
- d. Pengkoordinasian di Bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penaatan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
- e. Pelaksanaan Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penaatan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
- f. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penaatan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

Pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dalam tabel 2.2.

**TABEL 2.2. PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
1	Jumlah dokumen perencanaan Lingkungan Hidup			1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	Realisasi 2025 dan proyeksi 2026 memakai nilai dan angka target
2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)			74,75 Poin	74,97 Poin	76,51 Poin	76,68 Poin	74,8 Poin	74,97 Poin	76,51 Poin	76,68 Poin	Realisasi 2025 dan proyeksi 2026 memakai nilai dan angka target
3	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri) (ton).			1.407.474,827 ton	1.407.674,877 ton	1407874,927 ton	1408074,927 ton	947.842,50 ton	1.407.674,877 ton	1.407.874,927 ton	1.408.074,927 ton	Realisasi 2025 dan proyeksi 2026 memakai nilai dan angka target
4	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH (%)			78,00%	79,00%	80,00%	0,19	12,68%	79,00%	17,00%	19,00%	Realisasi 2025 dan proyeksi 2026 memakai nilai dan angka target
5	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup (%)			87,00%	88,00%	89,00%	0,85	100,00%	88,00%	80,00%	85,00%	Realisasi 2025 dan proyeksi 2026 memakai nilai dan angka target
6	Jumlah keberadaan MHA, Kearifan lokal dan hak MHA terkait dengan PPLH			2 MHA	2 MHA	2 MHA	1 MHA	1 MHA	2 MHA	1 MHA	1 MHA	Realisasi 2025 dan proyeksi 2026 memakai nilai dan angka target
7	Jumlah kegiatan pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup yang dilakukan			2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Realisasi 2025 dan proyeksi 2026 memakai nilai dan angka target

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
9	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang (ton)			18271,13 ton	18636,55 ton	18822,92 ton	19003,29 ton	29.180,81 ton	18.636,55 ton	18.822,92 ton	19.003,29 ton	Realisasi 2025 dan proyeksi 2026 memakai nilai dan angka target
10	Nilai Kepuasan Masyarakat			83 Nilai	84 Nilai	85 Nilai	86 Nilai	80,81 Nilai	84 Nilai	85 Nilai	86 Nilai	Realisasi 2025 dan proyeksi 2026 memakai nilai dan angka target

2.3. Isu-isu Penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Terkait dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, tidak terlepas dari dokumen perencanaan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD dan Renstra. Dalam penyusunan dokumen perencanaan Dinas Lingkungan Hidup, pencapaian visi misi Provinsi Kalimantan Tengah menjadi salah satu fokus dan tujuan utama yang harus dipenuhi. Sebagaimana tertuang dalam Rancangan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Tengah memiliki mandat untuk berkontribusi langsung terhadap pencapaian dua misi strategis daerah, yaitu Misi 1 dan Misi 3. Mandat Misi 1 adalah **“Meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pemanfaatan sumber daya alam lokal”**, dengan tujuan spesifik yaitu **“Mewujudkan pemanfaatan sumber daya lokal berbasis hilirisasi berlandaskan prinsip ekonomi hijau dan ekonomi biru.”** Dalam konteks ini, DLH memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam tidak hanya memenuhi aspek ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan ekologis, melalui penerapan prinsip ekonomi hijau dalam pengelolaan limbah, jasa lingkungan, dan konservasi sumber daya hayati. Sementara itu, mandat Misi 3 adalah **“Membangun infrastruktur yang merata dan berkeadilan untuk meningkatkan konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis lingkungan”**, dengan tujuan **“Meningkatkan ketahanan ekologi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.”** DLH memegang peranan penting dalam memastikan bahwa pembangunan infrastruktur berlangsung secara berkelanjutan, melalui upaya pengendalian dampak lingkungan, penguatan tata kelola izin lingkungan, serta perlindungan kawasan bernilai konservasi tinggi.

Rincian tujuan dan sasaran pembangunan serta indikator jangka waktu 5 (lima) tahun di Provinsi Kalimantan Tengah yang berkaitan dengan lingkungan hidup terlihat sebagaimana matriks berikut ini

Visi			
“Mengangkat Harkat Martabat Dayak Khususnya, Umumnya Masyarakat Kalimantan Tengah (Mangatang Utus), dengan Spirit Kearifan Lokal dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Menuju Kalteng Berkah, Kalteng Maju, Kalteng Bermartabat Untuk Menyambut Indonesia Emas 2045”			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator
M1. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pemanfaatan sumber daya alam lokal	T2. Mewujudkan pemanfaatan sumber daya lokal berbasis hilirisasi berlandaskan prinsip ekonomi hijau dan ekonomi biru		Pertumbuhan Ekonomi (%)
		S3. Terwujudnya pengembangan produk dan industri unggulan daerah melalui hilirisasi berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru	Indeks ekonomi hijau daerah

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator
M3. Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkeadilan untuk meningkatkan konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis lingkungan	T6. Meningkatkan ketahanan ekologi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat	S16. Tercapainya pengurangan kejadian degradasi lingkungan dan peningkatan nilai ekonomi karbon	Indeks kualitas lingkungan hidup
			Indeks pengelolaan keanekaragaman hayati
			Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca

Isu strategis pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD, berkaitan dengan lingkungan hidup adalah degradasi lingkungan.

Isu Strategis yang dirumuskan dalam Rancangan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029, yang menjadi perhatian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup adalah meliputi :

1. Pengelolaan sampah yang belum optimal.
 Produksi sampah di Kalimantan Tengah terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan aktivitas ekonomi. Volume timbulan sampah diperkirakan mencapai 3.000–3.500 ton/hari (proyeksi KLHK berdasarkan timbulan nasional 0,7 kg/kapita/hari). Namun, tingkat pengelolaan baru sekitar 55–60%, dengan dominasi metode open dumping di TPA. Berdasarkan SIPSN-KLHK 2023, capaian pengurangan sampah nasional baru 16,9% dan penanganan 37,5%, masih jauh dari target nasional 30% pengurangan dan 70% penanganan pada 2025. Rendahnya fasilitas reduce-reuse-recycle (3R), keterbatasan bank sampah, serta rendahnya partisipasi masyarakat menghambat tercapainya target persampahan di daerah.
2. Kebakaran lahan gambut dan kekeringan.
 Provinsi Kalimantan Tengah memiliki gambut terluas di Indonesia, sekitar 3,01 juta hektar (KLHK, 2022). Kawasan ini sangat rentan terhadap kebakaran, terutama saat musim kemarau panjang. Pada 2019, luas lahan terbakar di Kalimantan Tengah mencapai 317 ribu hektar (BNPB), menimbulkan kerugian ekologis, ekonomi, dan kesehatan masyarakat. Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) di Palangka Raya saat puncak kebakaran sering berada pada kategori berbahaya, dengan konsentrasi PM2.5 melebihi 500 µg/m³. Kekeringan turut memperburuk risiko kebakaran dan mengurangi ketersediaan air bersih, sehingga berdampak pada ketahanan lingkungan dan pangan.
3. Penurunan kualitas air serta banjir akibat eksploitasi daerah tangkapan air.
 Konversi hutan untuk pertambangan, perkebunan, serta infrastruktur telah mengurangi fungsi daerah tangkapan air di Kalimantan Tengah. Terdapat 11 DAS prioritas nasional, termasuk DAS Kahayan, Kapuas, dan Barito, yang mengalami degradasi serius. Data Global Forest Watch menunjukkan tutupan hutan Kalimantan Tengah berkurang sekitar 15% dalam periode 2000–2020. Banjir besar tahun 2021 melanda 11

kabupaten/kota dengan lebih dari 50 ribu warga terdampak (BPBD Kalteng). Sedimentasi, pencemaran logam berat dari tambang, serta fluktuasi debit sungai mengancam kualitas air bersih, pertanian, dan kesehatan masyarakat.

4. Ancaman krisis sumber daya alam, pencemaran, deforestasi, fragmentasi dan degradasi lingkungan akibat eksploitasi berlebih dan pengelolaan tidak berkelanjutan.

Tekanan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dan tidak berkelanjutan menjadi ancaman nyata. Laju deforestasi Kalimantan Tengah pada 2015–2020 tercatat sekitar 70 ribu hektar per tahun (KLHK, 2021), terutama untuk perkebunan kelapa sawit dan pertambangan. Fragmentasi habitat menyebabkan hilangnya konektivitas ekosistem, sementara pencemaran dari aktivitas industri dan pertambangan memperburuk degradasi lingkungan. Pola pemanfaatan yang tidak terintegrasi berpotensi menimbulkan krisis lingkungan jangka panjang.

5. Pengelolaan limbah industri yang tidak terintegrasi.

Pertumbuhan industri di Kalimantan Tengah, termasuk pengolahan hasil tambang dan perkebunan, belum diiringi dengan sistem pengelolaan limbah yang memadai. Banyak limbah cair, padat, dan B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) belum ditangani sesuai standar. Minimnya fasilitas pengolahan limbah bersama di kawasan industri menimbulkan pencemaran perairan dan tanah. Data KLHK (2022) menunjukkan bahwa lebih dari 40% industri kecil dan menengah di Kalimantan belum memiliki IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah).

6. Pengelolaan dan pengawasan keanekaragaman hayati yang belum optimal.

Kalimantan Tengah merupakan bagian dari Heart of Borneo, kawasan dengan keanekaragaman hayati tingkat tinggi. Namun, upaya pengelolaan biodiversitas masih belum optimal. Perburuan liar, perdagangan satwa dilindungi, dan lemahnya pengawasan di kawasan konservasi mengancam keberlangsungan spesies endemik. Data BKSDA (2023) menunjukkan penurunan populasi orangutan di Kalimantan Tengah hingga 30% dalam dua dekade terakhir akibat hilangnya habitat. Selain pengelolaan yang lemah, kehilangan biodiversitas semakin nyata akibat deforestasi, fragmentasi habitat, dan perubahan iklim. Spesies penting seperti bekantan, enggang gading, dan harimau dahan menghadapi tekanan populasi. Kehilangan biodiversitas berdampak pada stabilitas ekosistem, potensi penelitian farmasi, serta pengembangan bioekonomi di masa depan.

7. Belum optimalnya pengawasan terhadap aktifitas pemanfaatan sumber daya alam untuk lingkungan.

Kegiatan eksploitasi sumber daya alam baik pertambangan, perkebunan, kehutanan, maupun perikanan seringkali dilakukan dengan praktik kurang ramah lingkungan. Lemahnya pengawasan serta keterbatasan kapasitas aparaturnya menyebabkan aktivitas pemanfaatan SDA sering menimbulkan kerusakan lingkungan. Menurut ICW (2022), kasus pelanggaran izin lingkungan di sektor tambang Kalimantan Tengah termasuk 5 besar

nasional. Penguatan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan menjadi keharusan.

8. Minimnya Hilirisasi dan deversifikasi produk turunan Sumber Daya Alam. Kalimantan Tengah ditetapkan pemerintah sebagai salah satu wilayah *Food Estate* Nasional serta memiliki peran penting dalam konservasi internasional melalui program *Heart of Borneo*. Selain itu, potensi hilirisasi SDA (seperti CPO, nikel, batubara, dan hasil hutan) menjadi pilar ekonomi baru. Namun, jika tidak dikelola dengan prinsip keberlanjutan, peran strategis ini justru dapat menimbulkan degradasi lingkungan besar-besaran. Oleh karena itu, keseimbangan antara pemanfaatan ekonomi, konservasi, dan keberlanjutan lingkungan harus dijaga.

Isu-isu penting tersebut di atas menjadi fokus penanganan dan menjadi dasar perencanaan dalam penentuan/penetapan program kegiatan prioritas yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup.

2.4. Review terhadap RKPD Tahun 2026

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2026 disusun sesuai dengan visi misi Gubernur Kalimantan Tengah. Oleh karena itu program dan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup juga menyesuaikan tema tersebut guna mendukung pencapaian visi misi daerah, khususnya untuk terkait dengan kelestarian lingkungan hidup.

Review terhadap RKPD Tahun 2026 secara rinci disajikan dalam tabel 2.3. Pada tabel tersebut disampaikan perbandingan antara rencana program dan kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dalam RKPD dibandingkan dengan hasil analisis kebutuhan perangkat daerah.

TABEL 2.3. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase keterlaksanaan (%)	100%	42.878.923.184,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase keterlaksanaan (%)	100%	42.878.923.184,00	
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				350.000.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				350.000.000,00	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Palangka Raya	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	250.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Palangka Raya	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	250.000.000,00	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Palangka Raya	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Palangka Raya	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Palangka Raya	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Palangka Raya	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Palangka Raya	Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Palangka Raya	Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Palangka Raya	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPASKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Palangka Raya	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Palangka Raya	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	20.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Palangka Raya	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	20.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Palangka Raya	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	15.000.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Palangka Raya	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	15.000.000,00	
8	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Palangka Raya	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	50 Data	10.000.000,00	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Palangka Raya	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	50 Data	10.000.000,00	
9	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Palangka Raya	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	15 Berita Acara	15.000.000,00	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Palangka Raya	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	15 Berita Acara	15.000.000,00	
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				18.935.710.184,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				18.935.710.184,00	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Palangka Raya	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	111 Orang/Bulan	18.915.710.184,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Palangka Raya	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	111 Orang/Bulan	18.915.710.184,00	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Palangka Raya	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	10.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Palangka Raya	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	10.000.000,00	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Palangka Raya	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	2 Laporan	10.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Palangka Raya	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	2 Laporan	10.000.000,00	
C	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				35.000.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				35.000.000,00	
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Palangka Raya	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	15.000.000,00	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Palangka Raya	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	15.000.000,00	
2	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Palangka Raya	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	20.000.000,00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Palangka Raya	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	20.000.000,00	

DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Jln. Willem A. Samat No. 08 Palangka Raya 73112-Kalimantan Tengah
Telp/Fax (0536) 3223756

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
D	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				1.410.000.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				1.410.000.000,00	
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Palangka Raya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	5 Paket	300.000.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Palangka Raya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	5 Paket	300.000.000,00	
2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Palangka Raya	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	10.000.000,00	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Palangka Raya	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	10.000.000,00	
3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Palangka Raya	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	150 Orang	1.000.000.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Palangka Raya	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	150 Orang	1.000.000.000,00	
4	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Palangka Raya	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan	50 Orang	100.000.000,00	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Palangka Raya	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan	50 Orang	100.000.000,00	
E	Administrasi Umum Perangkat Daerah				12.688.213.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah				12.688.213.000,00	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Palangka Raya	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	150.000.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Palangka Raya	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	150.000.000,00	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Palangka Raya	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	1.467.382.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Palangka Raya	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	1.467.382.000,00	
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Palangka Raya	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	40.000.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Palangka Raya	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	40.000.000,00	
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Palangka Raya	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	200.000.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Palangka Raya	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	200.000.000,00	
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Palangka Raya	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	25.000.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Palangka Raya	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	25.000.000,00	
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Palangka Raya	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300 Laporan	10.752.831.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Palangka Raya	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300 Laporan	10.752.831.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
7	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Palangka Raya	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	53.000.000,00	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Palangka Raya	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	53.000.000,00	
F	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				3.450.000.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				3.450.000.000,00	
1	Pengadaan Mebel	Palangka Raya	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	5 Paket	350.000.000,00	Pengadaan Mebel	Palangka Raya	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	5 Paket	350.000.000,00	
2	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Palangka Raya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 Unit	2.100.000.000,00	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Palangka Raya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 Unit	2.100.000.000,00	
3	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Palangka Raya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 Unit	1.000.000.000,00	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Palangka Raya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 Unit	1.000.000.000,00	
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.910.000.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.910.000.000,00	
G	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Palangka Raya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	10.000.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Palangka Raya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	10.000.000,00	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Palangka Raya	Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	600.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Palangka Raya	Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	600.000.000,00	
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Palangka Raya	Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.300.000.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Palangka Raya	Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.300.000.000,00	
3	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.100.000.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.100.000.000,00	
H	Penyediaan Jasa, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Palangka Raya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	20 Unit	500.000.000,00	Penyediaan Jasa, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Palangka Raya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	20 Unit	500.000.000,00	
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Palangka Raya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.300.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Palangka Raya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.300.000.000,00	

DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Jln. Willem A. Samat No. 08 Palangka Raya 73112-Kalimantan Tengah
Telp/Fax (0536) 3223756

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Palangka Raya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	300.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Palangka Raya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	300.000.000,00	
II	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti	76%	445.000.000,00	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti	76%	445.000.000,00	
A	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi				400.000.000,00	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi				400.000.000,00	
1	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi	1 Dokumen	260.000.000,00	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi	1 Dokumen	260.000.000,00	
2	Penetapan RPPLH Provinsi	Kalimantan Tengah	Dokumen RPPLH Provinsi yang ditetapkan	1 Dokumen	140.000.000,00	Penetapan RPPLH Provinsi	Kalimantan Tengah	Dokumen RPPLH Provinsi yang ditetapkan	1 Dokumen	140.000.000,00	
B	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi				45.000.000,00	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi				45.000.000,00	
1	Pembinaan, Penilaian, Evaluasi Terhadap KLHS Kabupaten/ Kota	Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen Telaahan Kesesuaian Kaidah dalam Penyusunan KLHS Kabupaten/ Kota	7 Dokumen	45.000.000,00	Pembinaan, Penilaian, Evaluasi Terhadap KLHS Kabupaten/ Kota	Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen Telaahan Kesesuaian Kaidah dalam Penyusunan KLHS Kabupaten/ Kota	7 Dokumen	45.000.000,00	
III	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Udara	1. 70,65 2. 78,64	7.181.350.058,00	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Udara	1. 70,65 2. 78,64	7.181.350.058,00	
A	Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup				7.091.350.058,00	Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup				7.091.350.058,00	
1	Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari lingkungan hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	150.000.000,00	Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari lingkungan hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	150.000.000,00	
2	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	Kalimantan Tengah	Jumlah Pengambilan Contoh Uji dan Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan yang Dilaksanakan	105 Paket	30.838.000,00	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	Kalimantan Tengah	Jumlah Pengambilan Contoh Uji dan Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan yang Dilaksanakan	105 Paket	30.838.000,00	

DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Jln. Willem A. Samat No. 08 Palangka Raya 73112-Kalimantan Tengah
Telp/Fax (0536) 3223756

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
2	Pelaksanaan Upaya Mitigasi Perubahan Iklim Tingkat Provinsi	Kalimantan Tengah	Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim	1 Laporan	100.000.000,00	Pelaksanaan Upaya Mitigasi Perubahan Iklim Tingkat Provinsi	Kalimantan Tengah	Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim	1 Laporan	100.000.000,00	
3	Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Kalimantan Tengah	Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut yang disusun	3 Laporan	1.250.000.000,00	Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Kalimantan Tengah	Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut yang disusun	3 Laporan	1.250.000.000,00	
4	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Kalimantan Tengah	Data dan Informasin Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	39 Lokasi	361.362.058,00	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Kalimantan Tengah	Data dan Informasin Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	39 Lokasi	361.362.058,00	
5	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah Air, Udara dan Laut	Kalimantan Tengah	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut yang dilaksanakan	5 Kegiatan	30.000.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah Air, Udara dan Laut	Kalimantan Tengah	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut yang dilaksanakan	5 Kegiatan	30.000.000,00	
6	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emis GRK	Kalimantan Tengah	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emis GRK	1 Dokumen	106.000.000,00	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emis GRK	Kalimantan Tengah	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emis GRK	1 Dokumen	106.000.000,00	
7	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Kalimantan Tengah	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	1 Dokumen	245.000.000,00	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Kalimantan Tengah	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	1 Dokumen	245.000.000,00	
8	Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di Provinsi	Kalimantan Tengah	Jumlah Peralatan pemantau kualitas lingkungan di Provinsi dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan	44 Unit	2.000.000.000,00	Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di Provinsi	Kalimantan Tengah	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di Provinsi dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan	44 Unit	2.000.000.000,00	
9	Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di Provinsi	Kalimantan Tengah	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di Provinsi yang dilakukan pemeliharaan	1 Unit	240.150.000,00	Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di Provinsi	Kalimantan Tengah	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di Provinsi yang dilakukan pemeliharaan	1 Unit	240.150.000,00	
10	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Kalimantan Tengah	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh aboratorium lingkungan	65 Dokumen	1.123.000.000,00	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Kalimantan Tengah	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	65 Dokumen	1.123.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
11	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan	Kalimantan Tengah	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan	1 laporan	500.000.000,00	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan	Kalimantan Tengah	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan	1 laporan	500.000.000,00	
12	Penyusunan Kebijakan terkait dengan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya	Kalimantan Tengah	Jumlah dokumen kebijakan terkait Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya	1 Dokumen	955.000.000,00	Penyusunan Kebijakan terkait dengan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya	Kalimantan Tengah	Jumlah dokumen kebijakan terkait Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya	1 Dokumen	955.000.000,00	
B	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup				90.000.000,00	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup				90.000.000,00	
1	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Kalimantan Tengah	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat lintas Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	3 Laporan	90.000.000,00	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Kalimantan Tengah	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat lintas Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	3 Laporan	90.000.000,00	
IV	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		Persentase RTH	0,255	434.204.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		Persentase RTH	0,255	434.204.000,00	
A	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi				434.204.000,00	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi				434.204.000,00	
1	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	2 Dokumen	334.204.000,00	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	2 Dokumen	334.204.000,00	
2	Pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam pengelolaan keanekaragaman hayati	Kalimantan Tengah	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	100 Orang	100.000.000,00	Pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam pengelolaan keanekaragaman hayati	Kalimantan Tengah	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	100 Orang	100.000.000,00	
V	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		Persentase limbah B3 yang terkelola	99,948	2.389.000.000,00	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		Persentase limbah B3 yang terkelola	99,948	2.389.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
A	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				2.389.000.000,00	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				2.389.000.000,00	
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/ atau Penimbunan	Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/ atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3	1 Dokumen	1.686.000.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/ atau Penimbunan	Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/ atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan	1 Dokumen	1.686.000.000,00	
2	Fasilitasi Pemenuhan Persetujuan Teknis Pengumpulan Limbah B3 skala provinsi yang terintegrasi dengan Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, dan Perizinan Berusaha	Kalimantan Tengah	Jumlah fasilitasi pemenuhan persetujuan teknis Pengumpulan Limbah B3 skala Provinsi yang terintegrasi dengan persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, dan Perizinan Berusaha	1 Dokumen	700.000.000,00	Fasilitasi Pemenuhan Persetujuan Teknis Pengumpulan Limbah B3 skala provinsi yang terintegrasi dengan Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, dan Perizinan Berusaha	Kalimantan Tengah	Jumlah fasilitasi pemenuhan persetujuan teknis Pengumpulan Limbah B3 skala Provinsi yang terintegrasi dengan persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, dan Perizinan Berusaha	1 Dokumen	700.000.000,00	
3	Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pengumpulan limbah B3 skala provinsi	Kalimantan Tengah	Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pengumpulan limbah B3 skala Provinsi yang dilakukan	12 Usaha	3.000.000,00	Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pengumpulan limbah B3 skala provinsi	Kalimantan Tengah	Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pengumpulan limbah B3 skala Provinsi yang dilakukan	12 Usaha	3.000.000,00	
VI	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH	17%	1.281.572.804,00	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH	17%	1.281.572.804,00	
A	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi				1.281.572.804,00	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi				1.281.572.804,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/ atau Izin PPLH	Kalimantan Tengah	Jumlah Rekomendasi dan/ atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	3 Dokumen	440.572.804,00	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/ atau Izin PPLH	Kalimantan Tengah	Jumlah Rekomendasi dan/ atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	3 Dokumen	440.572.804,00	
2	Pengembangan kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Kalimantan Tengah	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	5 orang	270.000.000,00	Pengembangan kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Kalimantan Tengah	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	5 orang	270.000.000,00	
3	Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Kalimantan Tengah	Jumlah PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	5 orang	21.000.000,00	Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Kalimantan Tengah	Jumlah PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	5 orang	21.000.000,00	
4	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kalimantan Tengah	Jumlah Badan usaha dan/ atau kegiatan yang diawasi	162 Usaha/ Kegiatan	300.000.000,00	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kalimantan Tengah	Jumlah Badan usaha dan/ atau kegiatan yang diawasi	162 Usaha/ Kegiatan	300.000.000,00	
5	Layanan Sarana Prasarana Penegakan Hukum bidang Lingkungan Hidup	Kalimantan Tengah	Jumlah Sarana Prasarana yang disediakan untuk Pengawas Lingkungan Hidup, Pengendali Dampak Lingkungan dan PPNS untuk menunjang Kinerja Penegakan Hukum	1 Unit	250.000.000,00	Layanan Sarana Prasarana Penegakan Hukum bidang Lingkungan Hidup	Kalimantan Tengah	Jumlah Sarana Prasarana yang disediakan untuk Pengawas Lingkungan Hidup, Pengendali Dampak Lingkungan dan PPNS untuk menunjang Kinerja Penegakan Hukum	1 Unit	250.000.000,00	
VII	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA TERKAIT DENGAN PPLH		Persentase MHA yang ditingkatkan Kapasitasnya	100%	149.749.000,00	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA TERKAIT DENGAN PPLH		Persentase MHA yang ditingkatkan Kapasitasnya	100%	149.749.000,00	
A	Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH				104.488.000,00	Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH				104.488.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	Koordinasi, sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA	1 Dokumen	104.488.000,00	Koordinasi, sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	1 Dokumen	104.488.000,00	
B	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH				45.261.000,00	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH				45.261.000,00	
1	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan pemberdayaan, kemitraan, pendampingan dan penguatan	1 Dokumen	45.261.000,00	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan pemberdayaan, kemitraan, pendampingan dan penguatan	1 Dokumen	45.261.000,00	
VIII	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		Persentase penyuluh lingkungan hidup yang ditingkatkan kompetensinya	55%	5.051.758.000,00	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		Persentase penyuluh lingkungan hidup yang ditingkatkan kompetensinya	55%	5.051.758.000,00	
A	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan				5.051.758.000,00	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan				5.051.758.000,00	
1	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Kalimantan Tengah	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat	230 orang	4.049.758.000,00	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Kalimantan Tengah	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat	230 orang	4.049.758.000,00	
2	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/keompok masyarakat	Kalimantan Tengah	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/keompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	1 Lembaga	652.000.000,00	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/keompok masyarakat	Kalimantan Tengah	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/keompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	1 Lembaga	652.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
3	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Kalimantan Tengah	Jumlah pembinaan dan pendampingan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	1 Dokumen	350.000.000,00	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Kalimantan Tengah	Jumlah pembinaan dan pendampingan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	1 Dokumen	350.000.000,00	
IX	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		Persentase partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	60%	482.000.000,00	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		Persentase partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	60%	482.000.000,00	
A	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Masyarakat				482.000.000,00	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Masyarakat				482.000.000,00	
1	Penilaian kinerja masyarakat/ lembaga masyarakat/ dunia usaha/ dunia pendidikan/ filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Kalimantan Tengah	Jumlah masyarakat/ lembaga masyarakat/ dunia usaha/ dunia pendidikan/ filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH	2 entitas	482.000.000,00	Penilaian kinerja masyarakat/ lembaga masyarakat/ dunia usaha/ dunia pendidikan/ filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Kalimantan Tengah	Jumlah masyarakat/ lembaga masyarakat/ dunia usaha/ dunia pendidikan/ filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH	2 entitas	482.000.000,00	
X	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP		Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	70%	1.328.000.000,00	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP		Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	70%	1.328.000.000,00	
A	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi				1.328.000.000,00	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi				1.328.000.000,00	
1	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	Kalimantan Tengah	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	1 Perkara	245.000.000,00	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	Kalimantan Tengah	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	1 Perkara	245.000.000,00	
2	Penyelesaian kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan Provinsi	Kalimantan Tengah	Jumlah kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan Provinsi	1 Perkara	475.000.000,00	Penyelesaian kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan Provinsi	Kalimantan Tengah	Jumlah kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan Provinsi	1 Perkara	475.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
3	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	Kalimantan Tengah	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang dikelola ditindaklanjuti/ ditangani	8 Pengaduan	112.000.000,00	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	Kalimantan Tengah	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang dikelola ditindaklanjuti/ ditangani	8 Pengaduan	112.000.000,00	
4	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi	Kalimantan Tengah	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Provinsi	1 Sanksi	100.000.000,00	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi	Kalimantan Tengah	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Provinsi	1 Sanksi	100.000.000,00	
5	Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas PPNS Daerah Bidang Lingkungan Hidup	Kalimantan Tengah	Jumlah PPNS Daerah bidang Lingkungan Hidup yang dibentuk dan ditingkatkan kapasitasnya	12 Orang	246.000.000,00	Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas PPNS Daerah Bidang Lingkungan Hidup	Kalimantan Tengah	Jumlah PPNS Daerah bidang Lingkungan Hidup yang dibentuk dan ditingkatkan kapasitasnya	12 Orang	246.000.000,00	
6	Pengembangan Kapasitas SDM bidang Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	Kalimantan Tengah	Jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitasnya dalam bidang Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	30 Orang	150.000.000,00	Pengembangan Kapasitas SDM bidang Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	Kalimantan Tengah	Jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitasnya dalam bidang Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	30 Orang	150.000.000,00	
XI	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	45	49.323.800.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	45	49.323.800.000,00	
A	Penanganan Sampah di TPA/ TPST Regional				49.323.800.000,00	Penanganan Sampah di TPA/ TPST Regional				49.323.800.000,00	
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan	1 Dokumen	3.000.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan	1 Dokumen	3.000.000,00	
2	Pengelolaan sampah Regional	Kalimantan Tengah	Jumlah sampah regional yang dikelola	1050 Ton	6.895.000.000,00	Pengelolaan sampah Regional	Kalimantan Tengah	Jumlah sampah regional yang dikelola	1050 Ton	6.895.000.000,00	
3	Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional	Kalimantan Tengah	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional	40 Unit	41.805.800.000,00	Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional	Kalimantan Tengah	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional	40 Unit	41.805.800.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
4	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/ kota	Kalimantan Tengah	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	1 Dokumen	120.000.000,00	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/ kota	Kalimantan Tengah	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	1 Dokumen	120.000.000,00	
5	Pelaksanaan Penanganan Sampah Spesifik atau pada kondisi khusus yang menjadi kewenangan provinsi	Kalimantan Tengah	Jumlah tonase sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang menjadi kewenangan provinsi yang ditangani	50 ton	500.000.000,00	Pelaksanaan Penanganan Sampah Spesifik atau pada kondisi khusus yang menjadi kewenangan provinsi	Kalimantan Tengah	Jumlah tonase sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang menjadi kewenangan provinsi yang ditangani	50 ton	500.000.000,00	
					110.945.357.046,00						110.945.357.046,00

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Untuk menyusun RKPD, pemerintah daerah wajib menyelenggarakan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang.

Selanjutnya sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, salah satunya mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, salah satunya melalui perencanaan daerah. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah diwujudkan melalui pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi serta nasional.

Musrenbang merupakan instrumen proses perencanaan pembangunan, sehingga secara teknis berbagai keputusan dalam pelaksanaan pembangunan dirumuskan secara bersama dan dilaksanakan sesuai dengan jenjang pemerintahan. Selain sebagai wahana untuk mensinkronkan dan merekonsiliasikan pendekatan *top-down* dengan *bottom-up*, musrenbang juga merupakan wahana untuk pendekatan penilaian kebutuhan masyarakat dengan penilaian yang bersifat teknis, resolusi konflik atas berbagai kepentingan pemerintah daerah dan non *government stakeholders* untuk pembangunan daerah, antara kebutuhan program pembangunan dengan kemampuan dan kendala pendanaan, dan wahana untuk mensinergikan berbagai sumber pendanaan pembangunan.

Dalam penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 yang merupakan salah satu acuan dalam penyusunan Renja, telah dilakukan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang, mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten, sampai dengan provinsi termasuk penyelenggaraan Forum PD dan/atau Gabungan PD. Usulan kegiatan sesuai hasil Musrenbang secara lengkap dirinci pada tabel 2.4.

TABEL 2.4. USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2026 / KEGIATAN MUSREMBANG TAHUN 2025

PD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

No.	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KAB/KOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Drs. YOHANES FREDDY ERING, M.Si	Bappeda Kab/Kota	Tingginya tingkat pencemaran sungai	PENGALIHAN ARUS, EROSI SUNGAI KAHAYAN DI DESA BUKIT LITI PULANG PISAU	DESA BUKIT LITI, KAB.PULANG PISAU , Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Pulang Pisau
2	Drs. Arton S. Dohong	Bappeda Kab/Kota	Belum optimalnya pelaksanaan Inventarisasi gas rumah kaca di Provinsi Kalimantan Tengah	PEMBANGUNAN JEMBATAN KOMPLEK PEMAKAMAN UMUM, DESA BUNTUT BALI, KEC. PULAU MALAN	DESA BUNTUT BALI, KEC. PULAU MALAN, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab Katingan
3	Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP.	Bappeda Kab/Kota	Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Pengadaan alat laboratorium untuk sampling dan Pengujian kualitas lingkungan volume 13 unit pagu 6.331.053.680	Kecamatan Arut Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Kotawaringin Barat
4	Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP.	Bappeda Kab/Kota	Belum optimalnya pengelolaan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Pengadaan sarana dan prasarana pengangkutan sampah volume 2011 unit pagu 8.809.503.360	Kecamatan Arut Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Kotawaringin Barat
5	Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP.	Bappeda Kab/Kota	Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Pengadaan sarana dan prasarana di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) volume 17 unit pagu 56.526.746.640	Kecamatan Arut Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Kotawaringin Barat
6	Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP.	Bappeda Kab/Kota	Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Pengadaan mesin pengolah sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) volume 2021 unit pagu 3.538.927.840	Kecamatan Arut Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Kotawaringin Barat
7	Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP.	Bappeda Kab/Kota	Belum optimalnya pengelolaan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) volume 15 unit/paket pagu 4.568.008.400	Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Kotawaringin Barat
8	Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP.	Bappeda Kab/Kota	Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Pengadaan sarana dan prasarana pengangkutan sampah volume 2011 unit pagu 8.809.503.360	Kecamatan Arut Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Kotawaringin Barat
9	Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP.	Bappeda Kab/Kota	Belum optimalnya pengelolaan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Pembangunan TPS Limbah B3	Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Kotawaringin Barat

No.	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KAB/ KOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10	Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP.	Bappeda Kab/Kota	Belum optimalnya pengelolaan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Pengadaan sarana dan prasarana penyimpanan dan pengumpulan limbah B3 volume 3 unit/dokumen pagu 1.449.333.000	Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Kotawaringin Barat
11	Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP.	Bappeda Kab/Kota	Belum optimalnya pengelolaan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Reviu dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) volume 1 dokumen pagu 587.084.000	Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Kotawaringin Barat
12	Kepala Desa Kupang Bersih	Bappeda Kab/Kota	Minimnya kapasitas regulasi dan pengawasan aktivitas perekonomian dalam rangka mendorong adopsi ekonomi berkelanjutan	Pintu Air (Buka Tutup) Betang Kuhung	Desa Kupang Bersih, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Barito Timur
13	Kepala Desa Kupang Bersih	Bappeda Kab/Kota	Tingginya tingkat pencemaran sungai	Bronjong Sungai Gahus	Desa Kupang Bersih, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Barito Timur
14	MENIK	Bappeda Kab/Kota	Capaian timbulan sampah terkelola masih rendah di beberapa kabupaten/kota	tidak adanya pengelolaan sampah dari pemerintah daerah sehingga di desa lopus sampah menjadi kendala besar,dengan itu masyarakat meminta pembangunan penampungan sampah dari beton 4 rt di tiap rt,dan TPS R 2 1 Unit	RT 01,02,03,04, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Lamandau
15	Kepala Desa Lalap	Bappeda Kab/Kota	Minimnya kapasitas regulasi dan pengawasan aktivitas perekonomian dalam rangka mendorong adopsi ekonomi berkelanjutan	ketersediaan Produk Air Minum dalam Kemasan UMKM di Desa	Desa Lalap, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Barito Timur
16	TENI	Bappeda Kab/Kota	Tingginya risiko kebakaran lahan gambut akibat aktivitas pertanian dan perkebunan	Sebagai daerah yang memiliki resiko tinggi terhadap kebakaran maka diperlukan pengadaan alat bantu pemadam kebakaran hutan dan lahan serta pengadaan fasilitas berupa tenda Posko Darurat Karhutla di wilayah Desa Kubung	Desa Kubung, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Lamandau
17	SUNARDI,Si.,M.Sc., M.Eng	Bappeda Kab/Kota	Ketergantungan pada sektor primer yang tidak berkelanjutan	Penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG)	Kab Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Sukamara

No.	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KAB/ KOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
18	SUNARDI,S.Si.,M.Sc., M.Eng	Bappeda Kab/Kota	Belum tersedianya Profil dan Rencana Induk Kenaekaragaman Hayati Tingkat Kabupaten/Kota	Penyusunan Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (RIP KEHATI)	Kab. Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Sukamara
19	SUNARDI,S.Si.,M.Sc., M.Eng	Bappeda Kab/Kota	Capaian timbunan sampah terkelola masih rendah di beberapa kabupaten/kota	Excavator dan Bulldozer (2 unit)	Kab Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Sukamara
20	SUNARDI,S.Si.,M.Sc., M.Eng	Bappeda Kab/Kota	Capaian timbunan sampah terkelola masih rendah di beberapa kabupaten/kota	Truck Arm Roll dan Dump Truck 3 Unit	Kab. Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Sukamara
21	SUNARDI,S.Si.,M.Sc., M.Eng	Bappeda Kab/Kota	Capaian timbunan sampah terkelola masih rendah di beberapa kabupaten/kota	Pusat Olah Organik (POO) 1 Paket	Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Sukamara
22	SUNARDI,S.Si.,M.Sc., M.Eng	Bappeda Kab/Kota	Capaian timbunan sampah terkelola masih rendah di beberapa kabupaten/kota	Belum adanya Rumah Kompos 2 unit	Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Sukamara
23	Dr. MEIGO, S.PD, M.SI	Bappeda Kab/Kota	Tingginya risiko kebakaran lahan gambut akibat aktivitas pertanian dan perkebunan	Masyarakat dilarang membakar lahan untuk membuka ladang padi sehingga diperlukan solusi berupa Alsintan Cultivator dan Mesin pemotong rumput untuk mendukung Pembukaan Lahan Tanpa Bakar. Proposal tersaji pada link berikut ini : 1) https://tinyurl.com/2p9425vp ; 2) https://tinyurl.com/48zuxvxy ; 3) https://tinyurl.com/4pWSC4mj ; 4) https://tinyurl.com/ybzj8cyw .	Desa Lopus, Desa Kubung dan Kelurahan Kudangan Kecamatan Delang, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Lamandau
24	Drs. CATUR FERIYANTO, M.T	Bappeda Kab/Kota	Tingginya risiko kebakaran lahan gambut akibat aktivitas pertanian dan perkebunan	Tosa Lengkap dengan Alat Pemadam Kebakaran untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan/pemukiman di 17 Kecamatan Wilayah Kabupaten Kapuas	Desa Pulau Telo, Kec Selat, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Kapuas

No.	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KAB/ KOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
25	BAKHZAR EFENDI, SE., M.Si	Bappeda Kab/Kota	Capaian timbulan sampah terkelola masih rendah di beberapa kabupaten/kota	Truk Angkutan Sampah Jenis Poso 3 unit	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Pulang Pisau, Jl. W.A.D. Duha Kompleks Perkantoran, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Pulang Pisau
26	BAKHZAR EFENDI, SE., M.Si	Bappeda Kab/Kota	Capaian timbulan sampah terkelola masih rendah di beberapa kabupaten/kota	Alat Berat berupa Excavator Jenis PC 200 1 unit	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Pulang Pisau, Jl. W.A.D. Duha Kompleks Perkantoran, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Pulang Pisau
27	BAKHZAR EFENDI, SE., M.Si	Bappeda Kab/Kota	Capaian timbulan sampah terkelola masih rendah di beberapa kabupaten/kota	Alat Berat berupa Excavator Mini Jenis PC 78 1 unit	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Pulang Pisau, Jl. W.A.D. Duha Kompleks Perkantoran, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Pulang Pisau
28	BAKHZAR EFENDI, SE., M.Si	Bappeda Kab/Kota	Capaian timbulan sampah terkelola masih rendah di beberapa kabupaten/kota	Kendaraan Bermotor Roda Tiga Angkutan Sampah Rumah Tangga 5 unit	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Pulang Pisau, Jl. W.A.D. Duha Kompleks Perkantoran, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Pulang Pisau
29	BUDI PURWANTO, SP., M. Si	Bappeda Kab/Kota	Tingginya risiko kebakaran lahan gambut akibat aktivitas pertanian dan perkebunan	Pengadaan Roundup (400 Liter) Rp. 59.400.000	Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Seruyan
30	BUDI PURWANTO, SP., M. Si	Bappeda Kab/Kota	Tingginya risiko kebakaran lahan gambut akibat aktivitas pertanian dan perkebunan	Pengadaan Gramoxone (400 Liter) Rp. 53.768.000	Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Seruyan
31	BUDI PURWANTO, SP., M. Si	Bappeda Kab/Kota	Tingginya risiko kebakaran lahan gambut akibat aktivitas pertanian dan perkebunan	Pengadaan Fungisida (30 Liter) Rp. 36.762.000	Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Seruyan

No.	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KAB/ KOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
32	BUDI PURWANTO, SP., M. Si	Bappeda Kab/Kota	Tingginya risiko kebakaran lahan gambut akibat aktivitas pertanian dan perkebunan	Pengadaan Insektisida (200 Botol) Rp. 40.920.000	Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Seruyan
33	BUDI PURWANTO, SP., M. Si	Bappeda Kab/Kota	Tingginya risiko kebakaran lahan gambut akibat aktivitas pertanian dan perkebunan	Pengadaan Bakterisida (100 Bungkus) Rp. 10.000.000	Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Seruyan
34	Ir. FRANZ SILA UTAMA, M.AP	Bappeda Kab/Kota	Capaian timbulan sampah terkelola masih rendah di beberapa kabupaten/kota	Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) 1 unit (Kementrian PUPR)	Desa Dayu, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Barito Timur
35	Ir. FRANZ SILA UTAMA, M.AP	Bappeda Kab/Kota	Capaian timbulan sampah terkelola masih rendah di beberapa kabupaten/kota	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sanitary Landfill 1 lokasi (Kementrian PUPR)	Desa Dayu, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Barito Timur
36	Ir. FRANZ SILA UTAMA, M.AP	Bappeda Kab/Kota	Capaian timbulan sampah terkelola masih rendah di beberapa kabupaten/kota	Dump Truck, 2 Unit, Exavator 1 Unit, Kontainer Arm Roll 4 Unit	DLH Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Barito Timur
37	Kariantio	Bappeda Kab/Kota	Capaian timbulan sampah terkelola masih rendah di beberapa kabupaten/kota	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengelola limbah rumah tangga dan kurangnya juga tempat untuk pembuangan sampah	Desa petarikan, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Lamandau
38	JONIAN TO, SP, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Belum tersedianya Profil dan Rencana Induk Kenaekaragaman Hayati Tingkat Kabupaten/Kota	Penyusunan Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (RIP KEHATI) Kabupaten Katingan (nilai usulan : Rp. 1.500.000.000)	Kasongan, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Katingan

No.	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KAB/ KOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
39	JONIAN TO, SP, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Capaian timbulan sampah terkelola masih rendah di beberapa kabupaten/kota	Perlunya Pengadaan Tempat Sampah Terpilah Beroda Besar - 200 buah (nilai usulan: Rp. 400.000.000)	Kecamatan Katingan Hilir, Kecamatan Tewang Sanggalang Garing, Kecamatan Pulau Malan, Kecamatan Katingan Tengah, Kecamatan Kamipang, Kecamatan Tasik Payawan, Kecamatan Mendawai, Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan , Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Katingan
40	Dr. ALANG ARIANTO, S.E., M.Si.	Bappeda Kab/Kota	Capaian timbulan sampah terkelola masih rendah di beberapa kabupaten/kota	Lebih dari 85% sekolah belum melakukan upaya Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah dan melakukan penginputan data dalam Aplikasi Sistem Informasi Adiwiyata (SIDIA) akibat kurangnya bimbingan teknis mengenai pelaksanaan program tersebut. Anggaran yang di usulkan : Rp.116.260.000	Sekolah di Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Kotawaringin Timur
41	Dr. ALANG ARIANTO, S.E., M.Si.	Bappeda Kab/Kota	Capaian timbulan sampah terkelola masih rendah di beberapa kabupaten/kota	Kurangnya sosialisasi, pelatihan dan pendampingan terhadap masyarakat dalam upaya memacu masyarakat untuk mengelola sampah dari sumbernya dan melakukan upaya pengelolaan secara 3R. Anggaran yang di usulkan:Rp.121.260.000	Seluruh wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Kotawaringin Timur
42	Dr. ALANG ARIANTO, S.E., M.Si.	Bappeda Kab/Kota	Capaian timbulan sampah terkelola masih rendah di beberapa kabupaten/kota	Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah 3R. Anggaran yang diusulkan sebesar Rp. 750.000.000	Desa Terantang, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Kotawaringin Timur
43	Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.AP.	Bappeda Kab/Kota	Capaian timbulan sampah terkelola masih rendah di beberapa kabupaten/kota	Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Jl. G.Obos XI (Komp.Perkantoran Lingkar Dalam), Provinsi Kalimantan Tengah	Kota Palangkaraya

No.	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KAB/ KOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
44	Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.AP.	Bappeda Kab/Kota	Minimnya kapasitas regulasi dan pengawasan aktivitas perekonomian dalam rangka mendorong adopsi ekonomi berkelanjutan	Belum dilakukannya : - sosialisasi Permen LH No 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Sanksi Administratif Bidang lingkungan Hidup Sosialisasi Permen Sosialisasi Permen 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jl. G.Obos XI (Komp.Perkantoran Lingkar Dalam), Provinsi Kalimantan Tengah	Kota Palangkaraya
45	Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.AP.	Bappeda Kab/Kota	Minimnya pengawasan dan penegakan upaya restorasi lingkungan melalui upaya reklamasi dan aktivitas pasca tambang	kurang sosialisasi terkait regulasi pengelolaan pasca tambang	Jl. G.Obos XI (Komp.Perkantoran Lingkar Dalam), Provinsi Kalimantan Tengah	Kota Palangkaraya
46	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Bappeda Kab/Kota	Capaian timbulan sampah terkelola masih rendah di beberapa kabupaten/kota	Capaian timbulan sampah terkelola masih rendah di kabupaten barito selatan	UPT.TPA SABABILAH, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Barito Selatan
47	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Bappeda Kab/Kota	Perlunya percepatan upaya restorasi lahan gambut	lambatnya restorasi lahan gambut untuk mencegah kebakaran berulang, memperlambat degradasi gambut, dan mengurangi emisi gas rumah kaca di kabupaten barito selatan	Desa Sababilah, Pamait, & Sanggu, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Barito Selatan
48	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Bappeda Kab/Kota	Minimnya kapasitas regulasi dan pengawasan aktivitas perekonomian dalam rangka mendorong adopsi ekonomi berkelanjutan	Minimnya kapasitas regulasi dan pengawasan aktivitas perekonomian dalam rangka mendorong adopsi ekonomi berkelanjutan di kabupaten barito selatan	Sunggu, Pararapak, Kaliahien, Mabuan, Sababilah, Penda Asam, Danau Sadar, Lembeng, Pamait, Buntok Kota, Wayun, Bintang Ara, Wungkur Baru, Ruhing Raya, Sarimbuah, Bantai Bambure, T.Layung, Rampa Mea, Talekoi, Pendang, Babai, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Barito Selatan

No.	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KAB/ KOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
49	Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.AP.	Bappeda Kab/Kota	Ketertinggalan pada sektor primer yang tidak berkelanjutan	Ketertinggalan pada sektor primer yang tidak berkelanjutan	Jl. G.Obos XI (Komp.Perkantoran Lingkar Dalam), Provinsi Kalimantan Tengah	Kota Palangkaraya
50	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Bappeda Kab/Kota	Tingginya tingkat pencemaran sungai	Tingginya tingkat pencemaran sungai	UPT. Laboratium, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Barito Selatan
51	Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.AP.	Bappeda Kab/Kota	Ketiadaan penghitungan neraca SDA dan pemetaan SDA	Ketiadaan penghitungan neraca SDA dan pemetaan SDA	Jl. G.Obos XI (Komp.Perkantoran Lingkar Dalam), Provinsi Kalimantan Tengah	Kota Palangkaraya
52	Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.AP.	Bappeda Kab/Kota	Belum tersedianya Profil dan Rencana Induk Kenaekaragaman Hayati Tingkat Kabupaten/Kota	Belum tersedianya Profil dan Rencana Induk Kenaekaragaman Hayati Tingkat Kabupaten/Kota	Jl. G.Obos XI (Komp.Perkantoran Lingkar Dalam), Provinsi Kalimantan Tengah	Kota Palangkaraya
53	Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.AP.	Bappeda Kab/Kota	Tingginya tingkat pencemaran sungai	Belum adanya alat portable untuk Pemantauan Kualitas Air sebagai pecepatan dalam menentukan percepatan hasil kualitas air sungai	Jl. G.Obos XI (Komp.Perkantoran Lingkar Dalam), Provinsi Kalimantan Tengah	Kota Palangkaraya
54	Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.AP.	Bappeda Kab/Kota	Capaian timbulan sampah terkelola masih rendah di beberapa kabupaten/kota	Capaian timbulan sampah terkelola masih rendah di beberapa kabupaten/kota	Jl. G.Obos XI (Komp.Perkantoran Lingkar Dalam), Provinsi Kalimantan Tengah	Kota Palangkaraya
55	Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.AP.	Bappeda Kab/Kota	Tingginya risiko kebakaran lahan gambut akibat aktivitas pertanian dan perkebunan	Masih belum optimalnya aksi penanganan kerusakan ekosistem gambut	Jl. G.Obos XI (Komp.Perkantoran Lingkar Dalam), Provinsi Kalimantan Tengah	Kota Palangkaraya
56	Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.AP.	Bappeda Kab/Kota	Perlunya percepatan upaya restorasi lahan gambut	Masih belum optimalnya aksi penanganan kerusakan ekosistem gambut	Jl. G.Obos XI (Komp.Perkantoran Lingkar Dalam), Provinsi Kalimantan Tengah	Kota Palangkaraya
57	Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.AP.	Bappeda Kab/Kota	Belum optimalnya pelaksanaan Inventarisasi gas rumah kaca di Provinsi Kalimantan Tengah	Belum dilakukannya Sosialisasi Pelaksanaan Inventarisasi gas rumah kaca untuk pemenuhan data dalam penyusunan dokumen laporan IGRK di Kota Palangka Raya	Jl. G.Obos XI (Komp.Perkantoran Lingkar Dalam), Provinsi Kalimantan Tengah	Kota Palangkaraya

No.	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KAB/ KOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
58	Ir. FRANZ SILA UTAMA, M.AP	Bappeda Kab/Kota	Minimnya kapasitas regulasi dan pengawasan aktivitas perekonomian dalam rangka mendorong adopsi ekonomi berkelanjutan	Sistem Sosialisasi Sistem Tanggap Darurat Pengelolaan LB3, Peningkatan Kapasitas Apratur Sipil Negara (Bimtek Pengambilan Sampel Lahan Terkontaminasi Limbah B3, Bimtek Pengelolaan LB3 dan Non B3, Bimtek Pembuatan Pertek/Rintek LB3, Bimtek Sistem Pelaporan Elektroknik LB3 (SPEED)	Dusun Timur, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Barito Timur
59	Ir. FRANZ SILA UTAMA, M.AP	Bappeda Kab/Kota	Ketiadaan penghitungan neraca SDA dan pemetaan SDA	Pengadaan Drone DGI Mavic 3 Enterprice 3 Unit dan Baterai Drone 2 Unit, Kamera Trap 20 Unit	Kab. Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Barito Timur
60	Ir. FRANZ SILA UTAMA, M.AP	Bappeda Kab/Kota	Ketergantungan pada sektor primer yang tidak berkelanjutan	Penataan Taman/RTH Halaman Perumahan Pemda KM. 4 (Ex Perum DPRD), RTH /Hutan Kota Bangi, RTH Jalan Nansarunai	Kab. Bartim, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Barito Timur
61	Drs. CATUR FERİYANTO, M.T	Bappeda Kab/Kota	Capaian timbulan sampah terkelola masih rendah di beberapa kabupaten/kota	pengadaan fasilitas bak/tempat sampah sebanyak 1.126 bak/tempat sampah. tersebar di 15 kecamatan	15 Kecamatan di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Kapuas
62	Drs. CATUR FERİYANTO, M.T	Bappeda Kab/Kota	Tingginya tingkat pencemaran lingkungan	Laboratorium Lingkungan DLHK Kapuas sudah terakreditasi namun dengan parameter akreditasi yang masih terbatas dan adanya Peningkatan kegiatan/usaha akan berdampak pada kualitas lingkungan. Usulan : Pengadaan Alat Laboratorium yang terdiri dari : Spektrofotometer Uv-Vis 1 unit Thermoreaktor / Heating Block 1 unit Rotary Evaporator 1 unit Fume Hood include wet scrubber 1 unit Water Purification Sistem 1 unit Oven 1 unit Hotplate 1 unit Alat Uji Bakteri 1 unit	Kelurahan Selat Utara, Kecamatan Selat, kabupaten kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Kapuas

No.	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KAB/ KOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
63	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Bappeda Kab/Kota	Tingginya risiko kebakaran lahan gambut akibat aktivitas pertanian dan perkebunan	Keberadaan kasus kebakaran hutan	Sangu, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Barito Selatan
64	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Bappeda Kab/Kota	Capaian timbulan sampah terkelola masih rendah di beberapa kabupaten/kota	Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	UPT. TPA Sababilah, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Barito Selatan
65	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Bappeda Kab/Kota	Capaian timbulan sampah terkelola masih rendah di beberapa kabupaten/kota	Capaian timbulan sampah terkelola masih rendah di beberapa kabupaten/kota sehingga membutuhkan alat penjunjang Bulldozer	UPT. TPA Sababilah, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Barito Selatan
66	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Bappeda Kab/Kota	Capaian timbulan sampah terkelola masih rendah di beberapa kabupaten/kota	Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan seperti pembangunan PDU	UPT. TPA Sababilah, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Barito Selatan
67	Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP.	Bappeda Kab/Kota	Tingginya tingkat pencemaran sungai	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (RIP Kehati) Vol. 1 Dokumen Pagu 1.400.000.000	Kabupaten Kobar , Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Kotawaringin Barat
68	Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP.	Bappeda Kab/Kota	Belum tersedianya Profil dan Rencana Induk Kenaekaragaman Hayati Tingkat Kabupaten/Kota	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (RIP Kehati) Vol. 1 Dokumen dengan Pagu 1.400.000.000	Kabupaten Kobar , Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Kotawaringin Barat
69	Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP.	Bappeda Kab/Kota	Minimnya pengawasan dan penegakan upaya restorasi lingkungan melalui upaya reklamasi dan aktivitas pasca tambang	Pengadaan Kendaraan Operasional Pengawasan Lingkungan Hidup Vol. 1 Unit dengan Pagu 1.049.333.000	Kabupaten Kobar , Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Kotawaringin Barat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

Dalam perumusan tujuan dan sasaran perangkat daerah selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Rencana Strategis Perangkat Daerah, juga dilakukan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Agar penetapan prioritas pembangunan tepat sasaran dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional, maka perlu adanya penelaahan arah arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional. Hasil dari pemetaan dan analisis korelasi antara pembangunan nasional dan pembangunan daerah tercantum pada tabel 3.1 dan 3.2 berikut

Tabel 3.1 Tema Rencana Kerja Daerah Tahun 2026

Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026	Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026
Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif	Inovasi Pembangunan Daerah dan Hilirisasi SDA Berkelanjutan

Penyusunan Rencana Kerja tahun 2026 berpedoman pada kebijakan pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2026 dan diselaraskan dengan tema pembangunan prioritas provinsi. Prioritas nasional maupun Provinsi yang berkaitan dengan lingkungan hidup disajikan pada tabel berikut

Tabel 3.2 Prioritas dan Arah Kebijakan Pembangunan Nasional dan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi
PN 2 : Memantapkan system pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- Prioritas 1 : Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan stabilitas ekonomi dalam mendukung pembangunan - Prioritas 6 : Meningkatkan ketahanan ekologi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat

Memperhatikan arah kebijakan Nasional dan Provinsi tahun 2026, Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 mendukung secara langsung prioritas-prioritas pembangunan nasional maupun prioritas pembangunan provinsi Kalimantan Tengah.

3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA-PD

Tujuan dan sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2026 didasarkan pada perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029. Saat penulisan Renja ini, Renstra Tahun 2025-2029 masih dalam tahap penyusunan, sehingga dasar penetapan tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Rancangan Awal Renstra.

a. Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah selama periode 2025-2029 adalah :
 “Terwujudnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan”

b. Sasaran

Untuk mencapai tujuan diatas, maka disusun sasaran yang ingin di capai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu:

1. Meningkatnya upaya pengendalian dan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
2. Meningkatnya pengelolaan sampah dan Limbah B3;
3. Meningkatnya ketaatan penanggung jawab usaha terhadap perijinan lingkungan dan penyelesaian sengketa/dugaan pidana;
4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Tabel 3.3 Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja
Terwujudnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		Indeks kualitas lingkungan hidup	Angka	76,51
	Meningkatnya upaya pengendalian dan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	Indeks Kualitas Air	Indeks	70,65
		Indeks Kualitas Udara	Indeks	78,64
		Indeks Kualitas Lahan	Indeks	84,03
	Meningkatnya pengelolaan sampah dan limbah B3	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	Persentase	99,948
		Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	Ton	29420
	Meningkatnya pengelolaan sampah dan limbah B3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Provinsi	%	17
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	Angka	70,45

3.3. Program dan Kegiatan

Dalam mewujudkan pencapaian Tujuan dan Sasaran pembangunan, serta penyelesaian isu-isu penting pembangunan daerah, maka perlu dilakukan perumusan dan pelaksanaan program dan kegiatan prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah. Perumusan program dan kegiatan prioritas ini didasarkan melalui harmonisasi dan penyelarasan antara RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029, Renstra DLH Tahun 2025-2029, Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan RKPD Tahun 2026 dan mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 8) Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah
 - 9) Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan
 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD
 3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - 2) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 2) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - 3) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - 4) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
 - 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 5) Fasilitas Kunjungan Tamu
 - 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 7) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Pengadaan Mebel
 - 2) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 3) Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- II. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
 1. Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi
 - 1) Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi
 - 2) Penetapan RPPLH Provinsi
 2. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi
 - 1) Pembinaan, Penilaian, Evaluasi Terhadap KLHS Kabupaten/Kota
- III. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
 1. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup
 - 1) Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
 - 2) Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan
 - 3) Pelaksanaan Upaya Mitigasi Perubahan Iklim Tingkat Provinsi
 - 4) Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
 - 5) Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut

- 6) Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah Air, Udara dan Laut
 - 7) Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emis GRK
 - 8) Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah
 - 9) Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di Provinsi
 - 10) Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di Provinsi
 - 11) Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi
 - 12) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan
 - 13) Penyusunan Kebijakan terkait dengan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya
2. Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup
 - 1) Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
- IV. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
1. Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi
 - 1) Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
 - 2) Pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam pengelolaan keanekaragaman hayati
- V. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
1. Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
 - 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan
 - 2) Fasilitasi Pemenuhan Persetujuan Teknis Pengumpulan Limbah B3 skala provinsi yang terintegrasi dengan Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, dan Perizinan Berusaha
 - 3) Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pengumpulan limbah B3 skala provinsi
- VI. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
1. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
 - 1) Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
 - 2) Pengembangan kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
 - 3) Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
 - 4) Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- 5) Layanan Sarana Prasarana Penegakan Hukum bidang Lingkungan Hidup
- VII. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH
 1. Kegiatan Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH
 - 1) Koordinasi, sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH
 2. Kegiatan Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH
 - 1) Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH
- VIII. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
 1. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi
 - 1) Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi
 - 2) Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat
 - 3) Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
- IX. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
 1. Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Masyarakat
 - 1) Penilaian kinerja masyarakat/ lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/ filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- X. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
 1. Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi
 - 1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi
 - 2) Penyelesaian kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan Provinsi
 - 3) Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi
 - 4) Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi
 - 5) Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas PPNS Daerah Bidang Lingkungan Hidup
 - 6) Pengembangan Kapasitas SDM bidang Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
- XI. Program Pengelolaan Persampahan
 1. Kegiatan Penanganan Sampah di TPA / TPST Regional

- 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
- 2) Pengelolaan sampah Regional
- 3) Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional
- 4) Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/ kota
- 5) Pelaksanaan Penanganan Sampah Spesifik atau pada kondisi khusus yang menjadi kewenangan provinsi

3.4. Pohon Kinerja, Cascading, dan Crosscutting

Salah satu subkomponen penting dalam perencanaan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah adalah memastikan bahwa perencanaan kinerja telah disusun secara terukur dan terarah untuk mencapai hasil pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Penyusunan kinerja dilakukan melalui penyelarasan (*Cascading*) di setiap level organisasi secara logis dan sistematis, serta dengan memperhatikan keterkaitan lintas bidang atau *Crosscutting* agar pelaksanaan program berjalan terpadu dan saling mendukung.

Cascading Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah merupakan proses penjabaran dan penyelarasan sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU), dan/atau target IKU dari level yang lebih tinggi ke level yang lebih rendah, baik antar-unit kerja maupun antar-pejabat struktural. Proses ini memastikan bahwa setiap bidang dan individu memiliki kontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran strategis DLH.

Sementara itu, *Crosscutting* Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah menggambarkan keterkaitan pencapaian target kinerja yang dipengaruhi oleh faktor-faktor lintas sektor dan lintas urusan pemerintahan. Isu-isu seperti pengelolaan sampah, penurunan emisi gas rumah kaca, dan pengendalian pencemaran air, udara, serta tanah tidak hanya bergantung pada DLH, tetapi juga melibatkan kerja sama dengan perangkat daerah lain, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, dan masyarakat. Dengan demikian, pendekatan *crosscutting* memungkinkan identifikasi dan penanganan isu kinerja secara lebih menyeluruh dan terpadu.

Bagan Pohon Kinerja, *Cascading*, dan *Crosscutting* Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 dapat dilihat pada Lampiran dokumen ini.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan untuk tahun anggaran 2026 dan sekaligus merupakan referensi bagi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah yang berisikan program, kegiatan dan subkegiatan serta pagu indikatif.

Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2026 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah ini berisikan pedoman dan arahan dalam pelaksanaannya serta kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran.

Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program dan kegiatan yang disusun dalam Rencana Kerja tahun 2026 harus dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Untuk itu, diperlukan upaya keterpaduan dan sinergi dari elemen yang pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah baik sekretariat maupun bidang – bidang, demi mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan rapat koordinasi dan observasi sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Untuk menjaga efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program, maka monitoring dan evaluasi harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan dan dilaksanakan pada setiap tahapan, agar diperoleh hasil yang maksimal serta sebagai umpan balik bagi perencanaan tahap berikutnya.

Adapun Rencana Kerja berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan, output, outcome, pagu indikatif dan sumber pendanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 4.1 tentang Program, Kegiatan dan Sub kegiatan tahun 2026 dan perkiraan maju tahun 2027.

Rencana program, kegiatan dan subkegiatan yang tercantum pada Tabel 4.1 tentunya masih berupa rencana yang dapat mengalami perubahan pada realisasi tergantung pada beberapa faktor, misalnya menyesuaikan dengan kemampuan pembiayaan daerah, terbitnya peraturan perundangan yang mengganti peraturan yang berlaku saat ini, perubahan struktur organisasi dan lain sebagainya.

Adapun mengenai pelaksanaan program dan kegiatan, tentunya harus memiliki indikator yang dapat diukur dan hendaknya dilaksanakan oleh satu bidang saja sehingga alur pertanggungjawaban keberhasilan program tersebut menjadi jelas. Oleh karena itu nantinya diperlukan pula penyesuaian nama

program dan kegiatan agar tidak terjadi tumpang tindih antar bidang pelaksana dari program dan kegiatan tersebut.

Sesuai dengan kebijakan nasional, program dan kegiatan yang direncanakan tersebut secara langsung maupun tidak langsung pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup, baik melalui pengendalian pencemaran air dan udara serta untuk meningkatkan tutupan vegetasi. Selain itu juga bertujuan untuk penurunan emisi gas rumah kaca dan meningkatkan model sikap dan perilaku hidup masyarakat yang peduli terhadap alam dan lingkungan.

**TABEL 4.1. RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026
 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase keterlaksanaan (%)		100%	42.878.923.184,00			100%	44.057.900.664,00
2.11.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				350.000.000,00				353.500.000,00
2.11.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Palangka Raya	1 Dokumen	250.000.000,00	APBD		1 Dokumen	252.500.000,00
2.11.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Palangka Raya	1 Dokumen	10.000.000,00	APBD		1 Dokumen	10.100.000,00
2.11.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Palangka Raya	1 Dokumen	10.000.000,00	APBD		1 Dokumen	10.100.000,00
2.11.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Palangka Raya	1 Dokumen	10.000.000,00	APBD		1 Dokumen	10.100.000,00
2.11.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Palangka Raya	1 Dokumen	10.000.000,00	APBD		1 Dokumen	10.100.000,00
2.11.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Palangka Raya	3 Laporan	20.000.000,00	APBD		3 Laporan	20.200.000,00
2.11.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Palangka Raya	1 Laporan	15.000.000,00	APBD		1 Laporan	15.150.000,00
2.11.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Palangka Raya	50 Data	10.000.000,00	APBD		50 Data	10.100.000,00
2.11.01.1.01.0012	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Palangka Raya	15 Berita Acara	15.000.000,00	APBD		15 Berita Acara	15.150.000,00
2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				18.935.710.184,00				19.125.650.664,00
2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Palangka Raya	97 Orang/Bulan	18.915.710.184,00	APBD		114 Orang/Bulan	19.105.450.664,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.11.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Palangka Raya	1 Laporan	10.000.000,00	APBD		1 Laporan	10.100.000,00
2.11.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Palangka Raya	2 Laporan	10.000.000,00	APBD		2 Laporan	10.100.000,00
2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				35.000.000,00				35.350.000,00
2.11.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Palangka Raya	1 Dokumen	15.000.000,00	APBD		1 Dokumen	15.150.000,00
2.11.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Palangka Raya	1 Laporan	20.000.000,00	APBD		1 Laporan	20.200.000,00
2.11.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				1.410.000.000,00				1.424.100.000,00
2.11.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Palangka Raya	5 Paket	300.000.000,00	APBD		5 Paket	303.000.000
2.11.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Palangka Raya	1 Dokumen	10.000.000,00	APBD		1 Dokumen	10.100.000
2.11.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Palangka Raya	150 Orang	1.000.000.000,00	APBD		150 Orang	1.010.000.000
2.11.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Palangka Raya	50 Orang	100.000.000,00	APBD		50 Orang	101.000.000
2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				12.688.213.000,00				12.814.700.000,00
2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Palangka Raya	1 Paket	150.000.000,00	APBD		1 Paket	151.500.000,00
2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Palangka Raya	10 Paket	1.467.382.000,00	APBD		10 Paket	1.482.000.000,00
2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Palangka Raya	1 Paket	40.000.000,00	APBD		1 Paket	40.400.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Palangka Raya	1 Dokumen	200.000.000,00	APBD		1 Dokumen	202.000.000,00
2.11.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Palangka Raya	1 Laporan	25.000.000,00	APBD		1 Laporan	25.250.000,00
2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Palangka Raya	300 Laporan	10.752.831.000,00	APBD		300 Laporan	10.860.000.000,00
2.11.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Palangka Raya	1 Dokumen	53.000.000,00			1 Dokumen	53.550.000,00
2.11.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				3.450.000.000,00	APBD			4.234.500.000,00
2.11.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Palangka Raya	5 Paket	350.000.000,00	APBD		5 Paket	353.500.000,00
2.11.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Palangka Raya	1 Unit	2.100.000.000,00	APBD		1 Unit	2.121.000.000,00
2.11.01.2.07.0010	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Palangka Raya	1 Unit	1.000.000.000,00	APBD		1 Unit	1.760.000.000,00
2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.910.000.000,00				2.939.100.000,00
2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Palangka Raya	1 Laporan	10.000.000,00	APBD		1 Laporan	10.100.000,00
2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Palangka Raya	1 Laporan	600.000.000,00	APBD		1 Laporan	606.000.000,00
2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Palangka Raya	1 Laporan	2.300.000.000,00	APBD		1 Laporan	2.323.000.000,00
2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.100.000.000,00				3.131.000.000,00
2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Palangka Raya	20 Unit	500.000.000,00	APBD		20 Unit	505.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Palangka Raya	1 Unit	2.300.000.000,00	APBD		1 Unit	2.323.000.000,00
2.11.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Palangka Raya	1 Unit	300.000.000,00	APBD		1 Unit	303.000.000,00
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti		76%	445.000.000,00			77%	708.050.000,00
2.11.02.1.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi				400.000.000,00				662.600.000,00
2.11.02.1.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi	Kalimantan Tengah	1 Dokumen	260.000.000,00	APBD		1 Dokumen	662.600.000,00
2.11.02.1.02.0005	Penetapan RPPLH Provinsi	Dokumen RPPLH Provinsi yang ditetapkan	Kalimantan Tengah	1 Dokumen	140.000.000,00	APBD			
2.11.02.1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi				45.000.000,00				45.450.000,00
2.11.02.1.02.0009	Pembinaan, Penilaian, Evaluasi Terhadap KLHS Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kesesuaian Kaidah dalam Penyusunan KLHS Kabupaten/Kota	Kalimantan Tengah	7 Dokumen	45.000.000,00	APBD		7 Dokumen	45.450.000,00
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1. Indeks Kualitas Air 2. Indeks Kualitas Udara		1. 70,65 2. 78,64	7.181.350.058,00			1. 70,85 2. 78,84	7.253.250.000,00
2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup				7.091.350.058,00				7.162.350.000,00
2.11.03.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari lingkungan hidup yang Dilaksanakan	Kalimantan Tengah	1 Dokumen	150.000.000,00	APBD		1 Dokumen	151.500.000,00
2.11.03.1.01.0004	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	Jumlah Pengambilan Contoh Uji dan Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan yang Dilaksanakan	Kalimantan Tengah	105 Paket	30.838.000,00	APBD		105 Paket	287.300.000,00
2.11.03.1.01.0005	Pelaksanaan Upaya Mitigasi Perubahan Iklim Tingkat Provinsi	Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim	Kalimantan Tengah	1 Laporan	100.000.000,00	APBD		1 Laporan	101.000.000,00

DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Jln. Willem A. Samat No. 08 Palangka Raya 73112-Kalimantan Tengah
Telp/Fax (0536) 3223756

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.11.03.1.01.0008	Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut yang disusun	Kalimantan Tengah	3 Laporan	1.250.000.000,00	APBD		3 Laporan	1.262.500.000,00
2.11.03.1.01.0009	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Data dan Informasin Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	Kalimantan Tengah	39 Lokasi	361.362.058,00	APBD		39 Lokasi	108.800.000,00
2.11.03.1.01.0010	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah Air, Udara dan Laut	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut yang dilaksanakan	Kalimantan Tengah	5 Kegiatan	30.000.000,00	APBD		5 Kegiatan	30.300.000,00
2.11.03.1.01.0011	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emis GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	Kalimantan Tengah	1 Dokumen	106.000.000,00	APBD		1 Dokumen	107.000.000,00
2.11.03.1.01.0012	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	Kalimantan Tengah	1 Dokumen	245.000.000,00	APBD		1 Dokumen	247.450.000,00
2.11.03.1.01.0013	Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di Provinsi	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di Provinsi dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan	Kalimantan Tengah	44 Unit	2.000.000.000,00	APBD		40 Unit	2.020.000.000,00
2.11.03.1.01.0014	Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di Provinsi	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di Provinsi yang dilakukan pemeliharaan	Kalimantan Tengah	1 Unit	240.150.000,00	APBD		1 Unit	242.500.000,00
2.11.03.1.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	Kalimantan Tengah	65 Dokumen	1.123.000.000,00	APBD		70 Dokumen	1.134.000.000,00
2.11.03.1.01.0016	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan	Kalimantan Tengah	1 laporan	500.000.000,00	APBD		1 laporan	505.000.000,00
2.11.03.1.01.0018	Penyusunan Kebijakan terkait dengan Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya	Jumlah dokumen kebijakan terkait Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya	Kalimantan Tengah	1 Dokumen	955.000.000,00	APBD		1 Dokumen	965.000.000,00
2.11.03.1.02	Penanggulangan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup				90.000.000,00				90.900.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.11.03.1.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat lintas Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Kalimantan Tengah	3 Laporan	90.000.000,00	APBD		3 Laporan	90.900.000,00
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase RTH		0,255	434.204.000,00			0,265	1.988.500.000,00
2.11.4.1.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi				434.204.000,00				1.988.500.000,00
2.11.04.1.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	Kalimantan Tengah	2 Dokumen	334.204.000,00	APBD		2 Dokumen	1.637.500.000,00
2.11.04.1.01.0006	Pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam pengelolaan keanekaragaman hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kalimantan Tengah	100 Orang	100.000.000,00	APBD		100 Orang	351.000.000,00
02.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase limbah B3 yang terkelola		99,948	2.389.000.000,00			99,950	1.706.000.000,00
2.11.05.1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				2.389.000.000,00				1.706.000.000,00
2.11.05.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	Kalimantan Tengah	1 Dokumen	1.686.000.000,00	APBD		1 Dokumen	1.702.900.000,00
2.11.05.1.01.0003	Fasilitasi Pemenuhan Persetujuan Teknis Pengumpulan Limbah B3 skala provinsi yang terintegrasi dengan Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, dan Perizinan Berusaha	Jumlah fasilitasi pemenuhan persetujuan teknis Pengumpulan Limbah B3 skala Provinsi yang terintegrasi dengan persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, dan Perizinan Berusaha	Kalimantan Tengah	1 Dokumen	700.000.000,00	APBD		-	0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.11.05.1.01.0004	Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pengumpulan limbah B3 skala provinsi	Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pengumpulan limbah B3 skala Provinsi yang dilakukan	Kalimantan Tengah	12 Usaha	3.000.000,00	APBD		12 Usaha	3.100.000,00
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH		17%	1.281.572.804,00			19%	1.294.400.000,00
2.11.06.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi				1.281.572.804,00				1.294.400.000,00
2.11.06.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Kalimantan Tengah	3 Dokumen	440.572.804,00	APBD		2 Dokumen	445.000.000,00
2.11.06.1.01.0005	Pengembangan kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	Kalimantan Tengah	5 orang	270.000.000,00	APBD		5 orang	272.700.000,00
2.11.06.1.01.0007	Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	Kalimantan Tengah	5 orang	21.000.000,00	APBD		5 orang	21.200.000,00
2.11.06.1.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Kalimantan Tengah	162 Usaha/ Kegiatan	300.000.000,00	APBD		170 Usaha/ Kegiatan	303.000.000,00
2.11.06.1.01.0010	Layanan Sarana Prasarana Penegakan Hukum bidang Lingkungan Hidup	Jumlah Sarana Prasarana yang disediakan untuk Pengawas Lingkungan Hidup, Pengendali Dampak Lingkungan dan PPNS untuk menunjang Kinerja Penegakan Hukum	Kalimantan Tengah	1 Unit	250.000.000,00	APBD		1 Unit	252.500.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase MHA yang ditingkatkan Kapasitasnya		100%	149.749.000,00			100%	455.500.000,00
2.11.07.1.01	Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH				104.488.000,00				105.500.000,00
2.11.07.1.01.0001	Koordinasi, sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Kalimantan Tengah	1 Dokumen	104.488.000,00	APBD		1 Dokumen	105.500.000,00
2.11.07.1.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH				45.261.000,00				350.000.000,00
2.11.07.1.02.0001	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan pemberdayaan, kemitraan, pendampingan dan penguatan	Kalimantan Tengah	1 Dokumen	45.261.000,00	APBD		1 Dokumen	350.000.000,00
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase penyuluh lingkungan hidup yang ditingkatkan kompetensinya		55%	5.051.758.000,00			60%	5.102.000.000,00
2.11.08.1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi				5.051.758.000,00				5.102.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.11.08.1.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat	Kalimantan Tengah	230 orang	4.049.758.000,00	APBD		250 orang	4.090.000.000,00
2.11.08.1.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkatkan kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	Kalimantan Tengah	1 Lembaga	652.000.000,00	APBD		1 Lembaga	658.500.000,00
2.11.08.1.01.0007	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah pembinaan dan pendampingan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	Kalimantan Tengah	1 Dokumen	350.000.000,00	APBD		1 Dokumen	353.500.000,00
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup		60%	482.000.000,00			65%	486.800.000,00
2.11.09.1.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Masyarakat				482.000.000,00				486.800.000,00
2.11.09.1.01.0001	Penilaian kinerja masyarakat/ lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/ filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH	Kalimantan Tengah	2 entitas	482.000.000,00	APBD		2 entitas	486.800.000,00
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup		70%	1.328.000.000,00			75%	1.341.300.000,00
2.11.10.1.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi				1.328.000.000,00				1.341.300.000,00
2.11.10.1.01.0005	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	Kalimantan Tengah	1 Perkara	245.000.000,00	APBD		1 Perkara	247.450.000,00
2.11.10.1.01.0006	Penyelesaian kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan Provinsi	Jumlah kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan Provinsi	Kalimantan Tengah	1 Perkara	475.000.000,00	APBD		1 Perkara	479.750.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.11.10.1.01.0009	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang dikelola ditindaklanjuti/ ditangani	Kalimantan Tengah	8 Pengaduan	112.000.000,00	APBD		8 Pengaduan	113.100.000,00
2.11.10.1.01.0010	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Provinsi	Kalimantan Tengah	1 Sanksi	100.000.000,00	APBD		1 Sanksi	101.000.000,00
2.11.10.1.01.0011	Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas PPNS Daerah Bidang Lingkungan Hidup	Jumlah PPNS Daerah bidang Lingkungan Hidup yang dibentuk dan ditingkatkan kapasitasnya	Kalimantan Tengah	12 Orang	246.000.000,00	APBD		12 Orang	248.500.000,00
2.11.10.1.01.0012	Pengembangan Kapasitas SDM bidang Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	Jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitasnya dalam bidang Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	Kalimantan Tengah	30 Orang	150.000.000,00	APBD		30 Orang	151.500.000,00
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah		45	49.323.800.000,00			47	48.043.200.000,00
2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/ TPST Regional				49.323.800.000,00				48.043.200.000,00
2.11.11.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan	Kalimantan Tengah	1 Dokumen	3.000.000,00	APBD		1 Dokumen	3.100.000,00
2.11.11.1.01.0011	Pengelolaan sampah Regional	Jumlah sampah regional yang dikelola	Kalimantan Tengah	1050 Ton	6.895.000.000,00	APBD		1050 Ton	6.963.900.000,00
2.11.11.1.01.0012	Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional	Kalimantan Tengah	40 Unit	41.805.800.000,00	APBD		40 Unit	40.450.000.000,00
2.11.11.1.01.0014	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/ kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Kalimantan Tengah	1 Dokumen	120.000.000,00	APBD		1 Dokumen	121.200.000,00
2.11.11.1.01.0015	Pelaksanaan Penanganan Sampah Spesifik atau pada kondisi khusus yang menjadi kewenangan provinsi	Jumlah tonase sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang menjadi kewenangan provinsi yang ditangani	Kalimantan Tengah	50 ton	500.000.000,00	APBD		50 ton	505.000.000,00
JUMLAH						110.945.357.046,00			112.436.900.664,00

BAB V PENUTUP

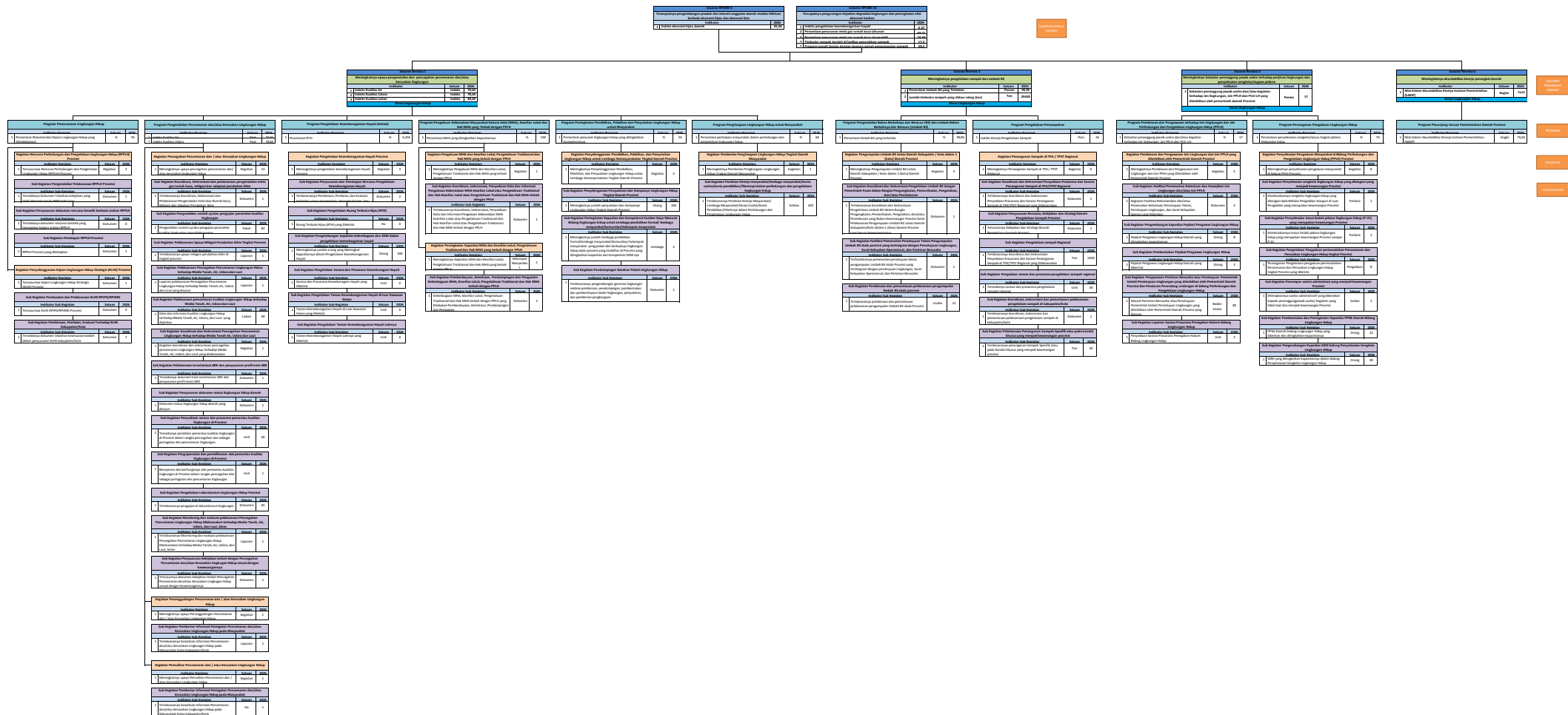
Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2026 ini merupakan dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup pada Tahun 2026 khususnya, dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya, serta didasarkan pada lintas program dan usulan masyarakat melalui mekanisme yang partisipatif, transparan, akuntabel, demokratis, efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan visi dan misi Provinsi Kalimantan Tengah yang menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup.

Sebagai dokumen rencana resmi daerah, diharapkan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 dapat dipedomani dan direalisasikan oleh aparatur pelaksana program/kegiatan, dengan tetap memperhatikan prinsip efektifitas, akuntabilitas dan efisiensi kinerja, baik dari segi fisik maupun penganggarnya.

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026, di dalam implementasinya perlu dilengkapi dengan dokumen turunan ataupun dokumen pelengkap (Petunjuk Operasional, Kerangka Acuan Kerja dan lain-lain) agar lebih mudah dalam implementasi dan pengoperasionalannya serta lebih memudahkan dalam pengendalian dan evaluasi pencapaian target dan kinerja yang telah ditetapkan, sekaligus untuk menjaga konsistensi dan keberlanjutannya. Dengan demikian tujuan utama untuk mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat segera terwujud.

Saran dan masukan terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Tahun 2026 ini sangat kami harapkan, demi kesempurnaan dokumen ini.

LAMPIRAN



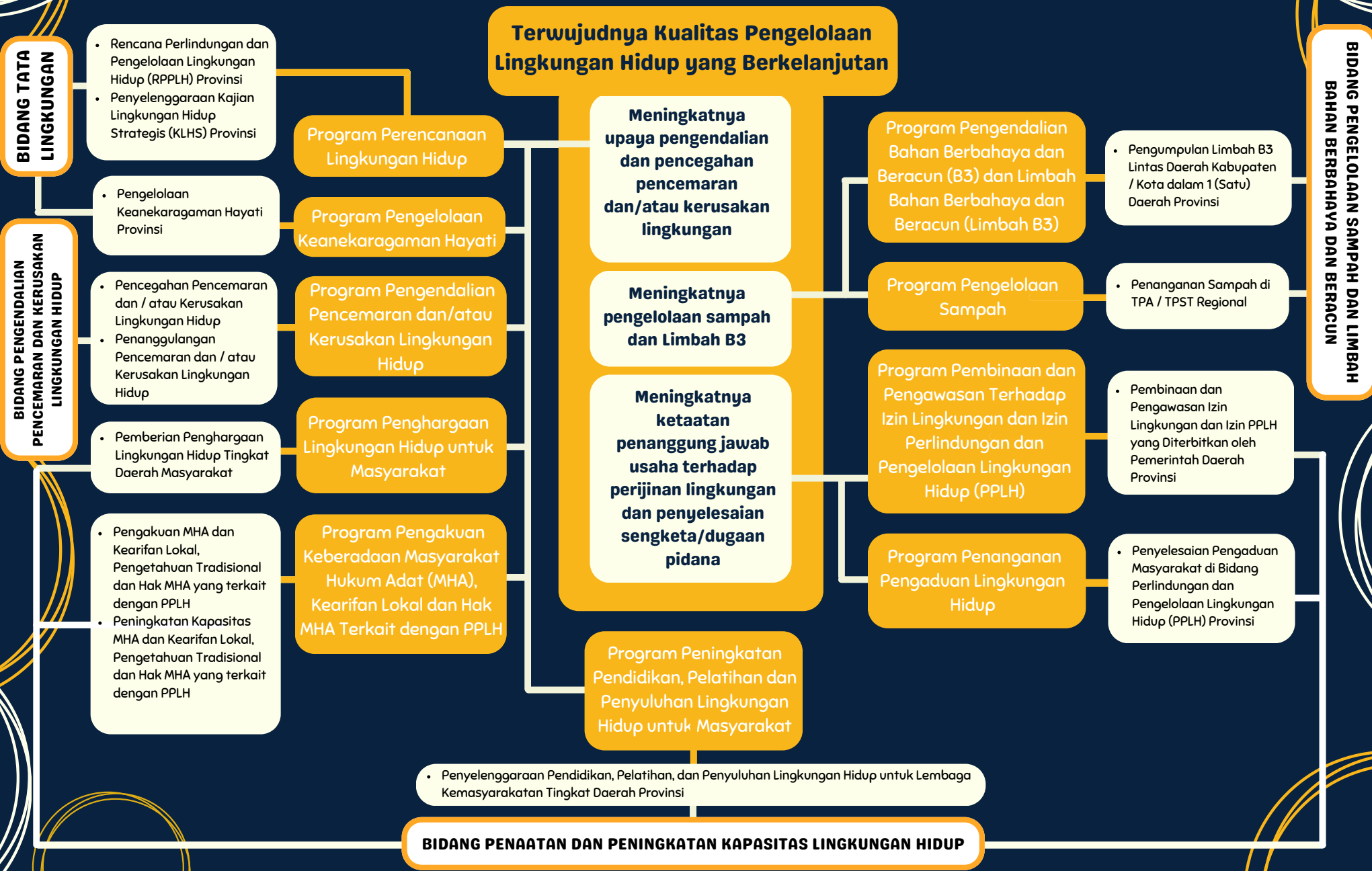


**CROSSCUTTING
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

TAHUN 2025-2029

CROSSCUTTING DLH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

ANTAR BIDANG-BIDANG DALAM PENCAPAIAN TUJUAN TAHUN 2025-2029



CROSSCUTTING DINAS LINGKUNGAN HIDUP

LINTAS OPD TAHUN 2025-2029



- Bapperida
 - Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, (integrasi isu lingkungan hidup ke dalam RPJMD, RKPD, serta pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan)
- Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas TPHP
 - Pengelolaan kawasan hutan, tata kelola lahan, serta pengendalian alih fungsi lahan yang berdampak pada kualitas lingkungan, tutupan hutan, dan ekosistem gambut.
 - Pengelolaan bidang tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan
- Dinas ESDM
 - Pengawasan kegiatan pertambangan, reklamasi pasca tambang, serta pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat aktivitas eksploitasi sumber daya alam
- DPMPTSP
 - Pengelolaan perumusan, perizinan dan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu
- Dinas PUPR
 - Pengelolaan tata ruang, infrastruktur pengendalian banjir, serta penyusunan rencana tata ruang yang berwawasan lingkungan dan berorientasi pada daya dukung serta daya tampung lingkungan hidup
- Dinas Kesehatan
 - Pengelolaan limbah medis dan B3, termasuk peningkatan kapasitas fasilitas pemusnahan limbah yang terbatas di Kalimantan Tengah
- Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran
 - Penanganan bencana lingkungan akibat perubahan hidrometeorologi, seperti banjir, kebakaran hutan dan lahan, serta tanah longsor
- Satpol PP dan Dinas Perhubungan
 - Penegakkan hukum daerah terkait ketertiban lingkungan, serta mendukung pengendalian emisi kendaraan bermotor yang memengaruhi kualitas udara
- Dinas Pendidikan
 - Program pendidikan lingkungan hidup, pengembangan sekolah adiwiyata, serta peningkatan kesadaran pelajar dan masyarakat dalam pelestarian lingkungan

CROSSCUTTING DINAS LINGKUNGAN HIDUP

LINTAS OPD TAHUN 2025-2029



- BKAD
 - Penyusunan rencana anggaran PD
 - Pengelolaan perbendaharaan PD
 - Pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan PD
- Inspektorat
 - Perumusan Kebijakan
 - Pendampingan dan Asistensi
 - Penyelenggaraan Pengawasan
 - Evaluasi SAKIP
- BKD
 - Administrasi kepegawaian
- Bappedalitbang
 - Penyusunan dokumen perencanaan PD
- Sekretariat Daerah
 - Kebijakan bidang Hukum
 - Kebijakan perekonomian dan pembangunan
 - LPPD/LKPJ
 - Pengadaan barang dan jasa
- Diskominfosantik
 - Pengelola informasi dan dokumentasi